Penerbit Abdi Fama
Semesta Literasi untuk Negeri

MENCINTAI ISLAM MENCINTAI INDONESIA

Wawasan Islam tentang Pancasila, Demokrasi, Nasionalisme dan Undang-undang

Lufaefi

Penerbit
Abdi Fama
Semesta Literasi untuk Negeri

Penerbit Abdi Fama
Semesta Literasi untuk Negeri

MENCINTAI ISLAM MENCINTAI INDONESIA

Wawasan Islam tentang Pancasila, Demokrasi, Nasionalisme dan Undang-undang

Lufaefi

Lufaefi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

Lingkup Hak Cipta

Pasal 2

(1) Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan Pidana

Pasal 72

(1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
(2) Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Mencintai Islam
Mencintai Indonesia

Wawasan Islam tentang Pancasila, Demokrasi, Nasionalisme
dan Undang-undang

Penerbit
Abdi Fama
Semesta Literasi untuk Negeri

Mencintai Islam Mencintai Indonesia

Wawasan Islam tentang Pancasila, Demokrasi, Nasionalisme dan Undang-undang

Lufaefi
Copyright 2023, Penerbit Cv. Abdi Fama Group
Jl. Purnawarman, No. 80, Ciampea, Ciampea, Bogor, Jawa Barat

Layout

Fitri Siska Supriatna

Desain Cover

Muhamad Abror

Perpustakaan Nasional RI
Katalog Dalam Terbitan (KDT)
Cetakan: Pertama, Desember 2022
ISBN: 978-623-09-0967-2

Diterbitkan oleh

Cv. Abdi Fama Group

Prakata Penulis

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga buku di hadapan pembaca ini dapat diselesaikan dengan baik. Buku yang awalnya merupakan artikel-artikel pendek penulis di berbagai media ini ingin kembali menegaskan bahwa rasa cinta umat Islam kepada agamanya bukan hal yang bertolak belakang dengan semangat kebangsaan. Muslim yang imannya kuat seyogyanya kecintaan kepada bangsanya juga kokoh. Sebaliknya, orang yang imannya masih lemah ia abai dengan kepentingan bangsanya.

Secara garis besar buku ini terdiri dari empat tema besar, yaitu Islam dan Pancasila, Islam dan Demokrasi, Islam dan Nasionalisme, serta Islam dan Undang-undang Dasar (UUD). Masing-masing dari keempatnya dibahas dengan beberapa sub tema yang lebih rinci dan spesifik. Dengan bahasa yang ringan, buku ini mengajak pembacanya untuk bangga menjadi muslim Indonesia sekaligus bahagia menjadi bangsa yang islami di bawah naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Di sisi lain, buku ini ditulis untuk menjawab asumsi sekelompok orang yang mengatasnamakan berjuang demi agama namun melakukan kekerasan baik secara verbal maupun tindakan sambil berlindung di bawah teks-teks suci agama. Akibat riak-riak suara kelompok ini, nilai-nilai kebangsaan kadang hilang dari lubuk nurani anak bangsa. Ada dari sebagian meraka yang mengkampanyekan negara Islam (*khilafah*), menuduh kufur sistem negara Indonesia, bahkan sampai melakukan kekerasan atas nama agama dengan tindakan radikal dan teror.

Penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terbitnya karya ini. Pertama, penulis sampaikan terima kasih indah untuk istri tercinta dan tersayang Lukita Fahriana, M.A. Untaian kata mungkin tidak bisa menjelaskan arti pentingnya dirinya untukku. Ia hadir memberi cinta, membawa bahagia, dan memberikan rasa rindu yang tiada habisnya. Berikutnya, penulis menyampaikan terima kasih untuk kedua orang tua; Mimi Rokhimah dan Bapak Kiai Abdul Mu'thi, dua malaikat yang selalu mendukung dan mendoakan penulis, baik dalam suka ataupun duka. Merekalah motivasi terhebat dalam hidup penulis. Tanpa keduanya, penulis mustahil dapat menyelesaikan karya ini.

Penulis juga menyampaikan terima kasih untuk kedua mertua penulis, Mamah Encah Heria Erianti, S.Pd. dan Bapak Ahmad Fudhola. Bimbingan dan arahan keduanya sangat penting dalam membangun kehidupan yang harmonis, baik di dalam ranah keluarga, masyarakat, maupun di dalam ranah pendidikan. Jika bukan karena bimbingan-bimbingannya, karya ini tidak akan lahir di hadapan para pembaca budiman.

Terimakasih selanjutnya untuk Kakak penulis, Siti Kholisoh, Kakak ipar Sulaeman, dan Adik-adik penulis, yaitu Muhamad Abror, Lu'lu il 'Aeni dan Ismatul Hayati serta keponakan penulis; Ridho Afriyansyah dan Faza Liqa Amanillah. Mereka pemberi semangat agar buku ini dapat terselesaikan dengan baik. Semoga perjalanan mereka dalam pencarian ilmu selalu dalam keberkahan, lindungan dan kenikmatan yang halal lagi *tayyiban* dari Allah SWT. Semoga mereka semua menjadi orang-orang yang selalu diberi kasih sayang, rahmat dan karunia Allah.

Terakhir, penulis sampaikan juga terima kasih untuk siapa saja yang telah mendukung penulisan ini, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Semoga seluruh amal dan doanya diterima Allah SWT. Amin.

Wallahu al-Muwaffiq ilā Aqwām Aṭ-Ṭarīq
Wassalāmu'alaikum Wr.Wb.

Lufefi, Jakarta, Desember 2022

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR - iii

DAFTAR ISI – vi

ISLAM DAN PANCASILA – 1

Negara Pancasila: Negara yang Amat Islami – 2
Pancasila Merepresentasikan Islam *Rahmatal Lil 'Alamin* – 4
Energi Pancasila Solusi Problem Generasi Milenial – 6
Siapa Musuh Utama Pancasila? – 11
Pancasila Sebagai Payung dalam Keanekaragaman Indonesia - 13
Pantaskah Pancasila Disebut Taghut? – 16
Nilai-Nilai Luhur Pancasila dan Hubungannya dengan Islam – 20
Pancasila, Piagam Madinah dan Gagal Paham Para Pengasong *Khilafah* – 25
Tafsir 5 Pancasila dalam Tinjauan Humanisme Islam – 29

ISLAM DAN DEMOKRASI – 32

Memaknai Demokrasi dalam Islam – 33
Hubungan Islam dan Demokrasi – 36
Kemuliaan Islam di Bawah Demokrasi – 39
Demokrasi VS Khilafah; Mana Produk Hukum Allah? – 42
Cacat Nalar Klaim Demokrasi Sistem Kafir dan Sistem Dajjal - 45

ISLAM DAN NASIONALISME – 48

Potret Nasionalisme dalam Kehidupan Rasulullah dan Sahabatnya – 49
Akhlak dalam Berbangsa – 52
Gagal Paham Memahami Nasionalisme – 55
Haruskah Mencintai Tanah Air? – 58
Alasan Mengapa Harus Mencintai Tanah Air – 61
Islam dan Nasionalisme; Dua Saudara Kembar yang Tak Bisa Dipisahkan – 64
Meneguhkan Kembali Prinsip Kebangsaan sebagai Penangkal Radikalisme – 68
Komitmen Nasionalisme Terhadap Kesadaran Keragaman Bangsa – 72
Praktik Cinta Tanah Air dan Kebangsaan dalam Islam – 76

ISLAM DAN UNDANG-UNDANG – 80

Indonesia; Negeri yang Amat Bersyariah – 81
Negara Indonesia Ekuivalen Negara Islam – 84
Hukum Allah Dalam Konteks Berbangsa dan Bernegara – 86
Negara Islam Juga Terjangkit Covid-19 – 90

DAFTAR PUSTAKA – 93
BIOGRAFI PENULIS – 98

PONDOK PESANTREN
KHAS KEMPEK

PEGAGAN – PALIMANAN – CIREBON
JAWA BARAT – INDONESIA

https://khaskempek.com

ISLAM DAN PANCASILA

Negara Pancasila: Negara yang Amat Islami

Istilah negara Pancasila merupakan penyatuan antara dua terma, yaitu negara dan Pancasila. Istilah ini pernah digunakan oleh beberapa tokoh dan salah satu diantaranya adalah Padmo Wahyono. Menurutnya, negara Pancasila adalah negara yang lahir didasari semangat kebersamaan untuk bebas dari penjajah dengan terbentuknya negara yang merdeka, adil, berdaulat, serta dengan pengakuan tegas adanya Tuhan Yang Maha Esa.

Secara sederhana juga dapat dipahami bahwa negara Pancasila ialah suatu bentuk negara yang menggunakan ideologi Pancasila sebagai landasan kehidupan masyarakatnya. Pancasila menjadi payung bersama setiap individu warganya untuk mencapai cita-cita luhur kemajuan negara baik kemajuan dalam peradaban ataupun politiknya.

Mahfud MD menegaskan negara Pancasila adalah negara yang menjadikan prinsip ketuhanan Yang Maha Esa sebagai *causa prima*. Dalam konteks keindonesiaan dapat dipahami bahwa negara Pancasila merupakan istilah lain dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang sarat nilai-nilai Islam. Prinsip ketuhanan menjadi prinsip dasar yang menjiwai negara Pancasila.

Fakta di atas juga secara tidak langsung menolak persepsi yang menyatakan bahwa negara Pancasila merupakan negara sekuler, yaitu suatu negara yang menjadikan nilai-nilai Islam sebagai sesuatu yang tak boleh menyatu dalam bingkai kenegaraan. Pun demikian menolak asumsi bahwa Indonesia adalah negara dimana hubungannya dengan agama terpisahkan satu sama lain.

Asumsi bahwa negara Pancasila adalah negara sekuler juga tertolak secara otomatis dengan butir pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD), sebagai sumber hukum negara, yang menyatakan bahwa negara terbentuk atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa. Negara Pancasila tidak berhenti pada tujuan menjadi negara yang berdaulat, tetapi juga menjadi negara yang mampu mengejewantahkan nilai-nilai agama sebagai perintah Tuhan Yang Maha Kuasa.

Kenyataan bahwa negara Pancasila merupakan negara yang islami juga nampak dari struktur lima Pancasila yang bukan saja mencita-citakan masa depan politik bangsa Indonesia, tetapi juga bagaimana manusia Indonesia menjadi manusia yang taat kepada Tuhan Yang Maha Esa (sila pertama), menjadi manusia yang adil dan beradab (sila kedua), manusia yang Mengedepankan persatuan (sila ketiga), mendahulukan musyawarah di setiap persoalan (sila keempat) dan menjadi insan yang berlaku adil bagi seluruh bangsa (sila kelima).

Fakta-fakta di atas memberi gambaran yang cukup terang bahwa Indonesia sebagai negara Pancasila adalah negara yang amat islami. Suatu negara yang mementingkan nilai-nilai agama sebagai landasan kehidupan warganya untuk mencapai kehidupan yang berkualitas. Hal ini sejalan dengan pandangan KH Hasyim Muzadi yang menyatakan bahwa negara Islam bukanlah negara yang menerapkan simbol-simbol agama secara *harfiyah*, akan tetapi negara yang mampu memberikan kemaslahatan kepada seluruh lapisan masyarakatnya.[]

Pancasila Merepresentasikan Islam *Rahmatal Lil 'Alamin*

Secara literal Pancasila bukanlah ideologi Islam. Islam tidak termaktub secara spesifik dalam batang tubuh ideologi negara Indonesia itu. Meskipun hakikatnya, nilai-nilai Islam sangat kental di dalam lima silanya.

Ketidakmunculan ajaran Islam secara literal di dalam Pancasila membuat sebagian umat Islam "kebakaran jenggot". Para pengasong *khilafah* misalnya, menuntut agar Pancasila dibuang jauh-jauh dan harus diganti dengan syariat Islam. Pancasila dianggap sebagai *taghut* karena dipuja-puja bangsa Indonesia yang padahal bukan merupakan sesembahan (tuhan).

Dalam sejarah pembentukan Pancasila, terjadi perdebatan panjang antar golongan Islam dan Nasionalis. Perdebatannya adalah terkait apakah di dalam sila Pancasila harus memunculkan tujuh kata yang mengarah kepada Islam (*Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya*) atau tidak perlu, karena alasan kemerdekaan Indonesia diraih bukan hanya oleh orang Islam, tetapi juga oleh tokoh-tokoh dan elemen dari agama-agama di luar Islam. Meskipun perdebatannya sempat alot, tujuh kata tersebut sepakat untuk dihilangkan dan diganti dengan sila pertama yang sampai hari ini disepakati, yaitu "Ketuhanan Yang maha Esa".

Pada perkembangannya baik golongan Islam maupun golongan nasionalis keduanya menerima dan menyetujui Pancasila menjadi payung bersama warga negara dengan segala perbedaan di dalamnya. KH Wahid Hasyim, tokoh NU, dan Ki Bagus Hadikusumo, tokoh Muhammadiyah, adalah dua tokoh Islam yang tidak diragukan kecerdasan dan keilmuannya.

Keduanya menyepakati Pancasila menjadi dasar negara meskipun Indonesia dihuni oleh mayoritas muslim.

Fakta di atas secara tidak langsung menolak anggapan pengusung *khilafah* yang mengatakan bahwa tidak ada nilai-nilai Islam di dalam Pancasila. Padahal, menyatakan bahwa Pancasila tidak islami sama saja dengan meragukan keislaman dan keilmuan dua tokoh Islam tersebut sebagai poros perjuangan umat Islam ketika masa kemerdekaan bangsa Indonesia.

Dua tokoh ulama nusantara itu menerima Pancasila menjadi ideologi bangsa Indonesia sebab sarat nilai-nilai Islam. Terlebih Pancasila terbukti mampu menyatukan bangsa Indonesia dalam segala macam perbedaan di dalamnya. Pun karena persatuan, salah satu prinsip utama ideologi Pancasila, juga merupakan ajaran Islam yang patut dijunjung tinggi oleh semua umatnya. Sehingga Pancasila dapat menjadi representasi ajaran-ajaran Islam sebagai agama kasih sayang kepada semua golongan. Agama yang mengedepankan nilai-nilai persatuan.

Kerahmatan Pancasila bagi segenap bangsa Indonesia dengan muktikukturalnya juga ditegaskan oleh Hamka Haq. Menurutnya, Pancasila merupakan pengejewantahan dari ajaran Islam *rahmatal lil alamin*, yang dapat mengayomi sendi-sendi perbedaan yang ada di dalam bangsa Indonesia.

Akhirnya, Pancasila bukan saja sejalan dengan nilai universal Islam, tetapi juga dapat memantapkan setiap bangsa untuk mencintai kerukunan, toleransi, keadilan dan kesamaan di mata hukum. Pancasila dapat meneguhkan jiwa-jiwa bangsa mengaplikasikan nilai-nilai ajaran Islam untuk seluruh manusia bahkan seluruh penduduk bumi. Pancasila menjadi aplikasi untuk menebar kerahmatan Islam bagi seluruh alam.[]

Energi Pancasila Solusi Problem Generasi Milenial

Saat ini kita dihadapkan pada persoalan bangsa dan negara yang cukup pelik. Dari mulai problem ketimpangan sosial, sentimen keberagamaan, ekonomi yang tidak merata, ujaran kebencian antar bangsa dan berbagai persoalan lainnya.

Semua itu tumbuh dan semakin berkembang tepat dengan tumbuhnya generasi milenial dengan berbagai kemajuannya. Menururt Zuly Qodir, problem yang cukup pelik yang saat ini dihadapi oleh generasi milenial ialah problem lemahnya semangat kebangsaan dan atribut bangsa yang selalu disanding-sandingkan serta dipertentangkan dengan ajaran agama Islam.

Generasi milenial sendiri merupakan generasi bangsa yang lahir antara tahun 1980-2000-an. Generasi ini umumnya ditandai oleh peningkatan penggunaan dan keakrabannya dengan media, alat komunikasi dan teknologi digital lainnya. Generasi ini memiliki pengaruh terhadap naik turunnya perpolitikan dan perekonomian di suatu wilayah. Bahkan, generasi ini memiliki dampak yang besar yang mengakibatkan tingkat pengangguran yang cukup tinggi di kalangan muda.

Masalah yang muncul dalam kehidupan generasi milenial mencakup berbagai aspek kehidupan di dalam bangsanya. Pertama, rawan pendangkalan nilai kebangsaan. Generasi milenial merupakan generasi yang selalu ingin berubah dan berinovasi dengan semaunya. Sampai-sampai inovasi yang dilakukan terkadang kebabalasan, hingga merenggut nilai-nilai kebangsaan yang seharusnya dijunjung tinggi demi bangsanya.

Tantangan yang dihadapi generasi milenial paling dasar ini adalah lemahnya jiwa kebangsaan pada diri mereka. Dengan

keinginan apa-apa yang hendak dicapai harus diraih dengan cara instan. Bahkan, problem dari sebagian mereka ialah sampai menganggap demokrasi dan nasionalisme sebagai ideologi yang "haram" untuk digunakan masyarakat Indonesia. Pemahaman demikian merupakan pendangkalan nilai kebangsaan yang disebabkan oleh lingkungan atau media sosial yang kurang tersaring dengan benar.

Kedua, rawan lunturnya paham kebhinekaan. Generasi milenial identik dengan generasi yang ingin mewujudkkan sesuatu yang baru dengan menggebu-gebu. Keinginan individunya terangsang hanya dari pemahaman yang didapati dengan instan, sehingga kadang bertentanga dengan persoalan bangsa. Salah satunya ialah masalah keberagaman atau kebhinekaan. Generasi milenial kadang tidak siap menghadapi kemajemukan yang sudah menjadi budaya bangsa. Egosime yang tertanam dalam dada mereka membuat mengesampingkan nilai-nilai luhur kebhinekaan yang seharusnya dipahami dan diaplikasikan dengan baik. Problem inilah yang kemudian memunculkan ujaran kebencian di sana sini.

Ketiga, pandangan keagamaan yang sempit. Jumlah penduduk muslim di Indonesia merupakan yang terbesar di dunia. Meskipun demikian, Indonesia lebih memilih sistem demokrasi sebagai sistem bernegara daripada bernegara berdasarkan agama. Kaitannya dengan generasi milenial dalam problematikanya ialah bahwa generasi milenial saat ini masih banyak yang memiliki pemahaman yang sempit terhadap pandangan keagamaan di negeri ini.

Sebagian dari meraka masih ada yang menganggap bahwa agama harus menjadi pondasi bernegara dan tidak boleh

disandingkan dengan yang lain. Mereka masih banyak yang meyakini bahwa demokrasi dan agama adalah dua hal yang bertentangan secara subtansif. Agama datang dari Tuhan, sedangkan demokrasi merupakan produk tangan manusia. Keduanya dinilai berhadapan dan tidak mungkin bertemu dalam satu titik.

Pancasila merupakan ideologi dasar bagi negara Indonesia. Ia merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Berdasarkan Ketetapan MPR No. II/MPR/1978, Pancasila memiliki butir-butir sakti yang dapat diamalkan oleh setiap warga bangsa dalam menjalankan aktifitas kehidupan di dalam suatu negara.

Butir-butir tersebut ialah pertama, *Ketuhanan Yang Maha Esa*. Sila pertama ini menuntut semua warga negara untuk meyakini satu agama dari apa yang diyakininya sesuai kepercayaan masing-masing. Sila ini juga memberi isyarat agar antarumat beragama dapat saling bahu membahu demi kesatuan bangsa Indonesia, meskipun keyakinan agamanya satu sama lain berbeda.

Kedua, *Kemanusiaan yang Adil dan Beradab*. Sila ini mengharuskan setiap warga negara untuk mengakui derajat persamaan, hak dan juga persamaan kewajiban. Sikap ini merupakan bentuk akhlak mulia yang ada pada seseorang manakala telah mengamalkan nilai-nilai kemanusiaan yang sempurna.

Ketiga, *Persatuan Indonesia*. Sila ini memberi penegasan antar satu individu dengan yang lain dalam sebuah bangsa harus bersatu dan tidak boleh hanya mementingkan egoisme individu.

Sila ini juga mengajarkan agar bangsa Indonesia dapat berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa dalam bentuk apapun.

Keempat, *Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan dan Perwakilan*. Elemen yang keempat ini memberi keharusan bagi setiap warga Indonesia untuk mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Semua itu harus dilalui dengan jalan musyawarah demi kepentingan bersama. Keputusan yang diambil tidak boleh bertentnagan dengan sila pertama tentang hak berkeyakinan masing-masing agama dan dengan keyakinan umum masyarakat.

Kelima, *Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia*. Sila ini menegaskan bahwa bangsa Indonesia harus menjalankan perbuatan-perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap gotong royong antar sesama warga. Sila ini juga megharuskan setiap warga untuk tidak bersikap boros dan menghargai masyarakat sekitarnya melalui penciptaan keadilan sosial.

Generasi milenial memiliki peran penting dalam merefleksikan energi positif Pancasila untuk menentukan arah bangsa ke depan. Sebagai generasi pemangku bangsa, generasi milenial harus mengedepankan nilai-nilai Pancasila sebagai solusi problem-problem yang dihadapinya untuk masa yang akan datang. Pancasila melalui lima silanya, diyakini mampu menghadapi problemnya saat ini. Problem dangkalnya nilai kebangsaan dan kebhinekaan dapat teratasi dengan elemen persatuan, dan problem sempitnya pemahaman agama dapat diatasi oleh sila pertama dengan esensi keragaman pemeluk Tuhan yang satu.

Begitupun problem nilai-nilai sosial dan gaya hidup, sekiranya cukup tepat solusinya adalah dengan nilai sila ketiga,

keempat dan kelima, yang menekankan untuk bersatu, bermasyarakat dan memiliki tanggung jawab sosial yang besar demi bangsa ke depan. Generasi Milenial harus berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila jika mencita-citakan kemajuan bangsa dan negaranya secara hakiki.[]

Siapa Musuh Utama Pancasila?

Bagi masyarakat yang beragama, agama adalah sesuatu yang sakral, yang diturunkan bukan saja menjadi jalan bagi seseorang untuk mempertebal keimanan, tetapi juga memperbaiki kondisi sosial. Agama merupakan wujud pesan Tuhan yang diturunkan bukan hanya mengatur urusan spiritual, namun juga memperbaiki masalah kehidupan secara faktual.

Pandangan ini ditentang oleh Karl Max (1843) dalam pernyataannya yang cukup kontroversi. Menurut Marx, *religion is the opium of the people*; agama adalah candu bagi masyarakat. Hal itu karena agama kerap menjadi alasan seseorang menggantungkan apapun persoalan hidupnya, termasuk menggantungkan sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan agama itu sendiri.

Kritik Max yang teks aslinya ditulis dalam bahasa Jerman itu, *Die Religion istdas Opium des Volkes*, dialamatkan kepada orang yang meyakini agama, namun tak bisa memosisikan keberadaannya. Agama kerap menjadi harapan hidup saat dalam kemiskinan ekonomi, namun enggan mau untuk bekerja dan berusaha. Agama sering menjadi desah hidup masyarakat dalam dunia yang tertindas, tetapi tidak melakukan perlawanan secara riil dengan tindakan yang positif.

Bagaimana kaitannya dengan Pancasila? Ideologi bangsa Indonesia ini dibentuk atas dasar keberagaman, baik dari sisi agama, suku, budaya, etnis maupun ras. Pancasila dibentuk bukan atas dasar ideologi agama tertentu, meskipun memiliki nilai-nilai agama yang amat kental. Pancasila memiliki ruh agama-agama,

guna menjamin eksistensi keberagamaan semua manusia dalam tubuh negara.

Menjadi manusia Indonesia harus hidup dalam genggaman Pancasila, tentu juga selain dengan menjalankan nilai-nilai agama yang universal oleh masing-masing pemeluknya. Pancasila harus menjadi landasan hidup bersama masyarakat Indonesia guna terus menyongsong persatuan dan kesatuan negara. Sebaliknya, menolak Pancasila sama saja dengan menolak keniscayaan keberagaman bangsa Indonesia. Menafikan Pancasila tidak berbeda dengan menafikan nilai-nilai universal agama-agama resmi di Indonesia.

Siapapun yang beragama dengan baik sudah semestinya menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Bukan malah sebaliknya mempertentangkan antar keduanya. Hanyalah musuh-musuh agama mereka yang menolak Pancasila. Karena secara esensial, agama dan Pancasila memiliki nilai-nilai yang sama. Keduanya menjunjung tinggi nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan dan keadilan sosial.

Musuh Pancasila bukanlah agama, tetapi predator agama yang kerap memanipulasi eksistensi agama untuk menolak Pancasila. Momok Pancasila bukanlah agama, namun mereka yang kerap memanipulasi teks agama guna membangkang pada nilai-nilai luhur Pancasila. Agama sebagaimana agama itu sendiri, relevan dan sejalan dengan lima sila Pancasila.[]

Pancasila Sebagai Payung dalam Keanekaragaman Indonesia

Indonesia merupakan negara yang dihuni oleh banyak keragaman, dari mulai keragaman suku, ras, etnis, budaya, bahkan keragaman agama. Negara yang dihuni oleh 274 juta jiwa ini memiliki 712 suku, 1.100 bahasa, 17.504 pulau dan memiliki 6 agama resmi. Meski keragaman Indonesia sangat besar, bangsa Indonesia tetap dalam kesatuan dan persatuan yang dibingkai dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Keutuhan bangsa Indonesia akan terus eksis karena Indonesia memiliki konsepsi nilai luhur bersama yang menjadi jati diri bangsa. Konsepsi tersebut adalah ideologi bangsa, yakni Pancasila. Ideologi yang dapat diterima oleh keberagaman bangsa Indonesia. Pancasila menjadi titik temu antar berbagai suku, ras, etnis, budaya, bahkan agama. Semuanya bermuara pada satu titik sakti; Pancasila.

Meskipun bangsa Indonesia menghadapi era disrupsi dan geo politik yang mau tidak mau harus dihadapi dengan seabreg tantangan dunia global, jika Pancasila terus menjadi tali simpul antar bangsa, semua akan dihadapi oleh bangsa Indonesia dengan tetap mempertahankan identitas bangsanya, yaitu sebagai bangsa yang kokoh dalam keharmonisan budaya. Dengan Pancasila, bangsa Indonesia akan menghadapi tantangan global dengan optimis, tanpa menghilangkan jati dirinya.

Bung Karno mengibaratkan Pancasila Sebagai *Philoshopiche Grondslag* atau falsafah dasar Negara. Bukan hanya itu, pada pidato sang Proklamator di depan BPUPK pada 1 Juni 1945, ia menyatakan bahwa Pancasila adalah "*walthanschauung*" atau pandangan dunia bagi segenap individu

bangsa Indonesia yang dapat mempertemukan semua keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia.

Yudi Latif juga menjelaskan bahwa keanekaragaman bangsa Indonesia memiliki potensi besar adanya persaingan negatif, bahkan saling bermusuhan. Bahkan pada titik yang paling buruk, hal itu sudah terjadi dengan adanya aksi bom yang dilakukan terorisme, ujaran kebencian dan saling caci maki antarbangsa, terutama di saat-saat tahun politik. Akan tetapi dengan adanya Pancasila, semua itu mudah untuk disudahi dan tidak menjadi problem yang mengglobal yang dapat mengganggu keharmonisan warganya.

Melalui sila pertamanya, *Ketuhanan Yang Maha Esa*, bangsa Indonesia bebas memeluk agamanya masing-masing sesuai pilihannya. Satu sama lain antar pemeluk agama-agama resmi di Indonesia dapat saling menghormati. Agama-agama dapat mengimplementasikan nilai-nilai luhurnya sebagai ajaran suci yang mengajarkan arti persaudaraan dan persatuan.

Melalui sila kedua, *Kemanusiaan yang adil dan beradab*, bangsa Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai warga bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Dengan sila ini setiap individu bangsa Indonesia terpayungi dalam nilai kemanusiaannya, tanpa dibatasi perbedaan.

Melalui sila ketiga, *Persatuan Indonesia*, bangsa Indonesia bangga menjadi warga negara yang selalu mendasari kehidupannya dengan nilai-nilai persatuan. Apapun yang datang dalam era globalisasi yang bisa saja mengancam bangsa atau ideologinya, nilai persatuan Pancasila menjadi kekuatan untuk membentengi semua itu.

Melalui sila keempat, *Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan*, bangsa Indonesia memiliki karakter yang mendahulukan nilai-nilai bijaksana dan mengutamakan musyawarah dalam menghadapi persoalan. Dengan begitu, solusi terbaik atas apapun persoalan yang dihadapi bangsa akan selalu terwujud. Harmoni nilai kebijaksanaan dan musyawarah menjadi benteng kokohnya persatuan bangsa.

Sedangkan melalui sila kelima, *Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*, bangsa Indonesia dituntut untuk bekerjasama, gotong rotong, dan inovatif dalam tujuan yang mulia, yaitu keadilan sosial. Keadaan sosial dalam segala bidang, baik berbangsa, bernegara ataupun beragama. Melalui sila ini pula kesejahteraan dimiliki oleh setiap individu bangsa Indonesia.

Pada akhirnya, Pancasila adalah simpul sakti untuk keberagaman bangsa Indonesia. Dengannya, persoalan bangsa dan negara, bahkan agama, mudah ditemukan *problem solving*-nya, karena Pancasila mampu memayungi seluruh keberagaman yang ada di Indonesia.[]

Pantaskah Pancasila Disebut Taghut?

Saat ini Pancasila menghadapi tantangan yang cukup serius. Tantangan tersebut datang dari faham fundamental yang menganggap ideologi negara sebagai produk kafir. Ideologi negara tersebut diklaim bukan ideologi islami sebab dibuat oleh manusia dan dibuat dengan tidak mendasari menggunakan syariat Islam. Puncak penolakan terhadap Pancasila dengan klaim bahwa menolaknya sama dengan menolak taghut.

Islam merupakan agama yang menitikberatkan kepada nilai-nilai, bukan simbol-simbol semata. Misalnya Nabi Muhammad ketika berada di Madinah, tidak menamakan kota Yatsrib dengan nama Negara Islam atau Kota Islam. Nabi Muhammad bersama para sahabatnya menamakannya dengan Negara Madinah (negara peradaban). Negara yang meskipun secara simbolik bukan Negara Islam, namun di dalamnya menerapkan nilai-nilai Islam secara sempurna, seperti persaudaraan, persatuan, kesamaan dan saling tolong menolong.

Secara eksplisit Pancasil tidak disebut dalam teks Al-Qur'an dan Hadis nabi. Namun di dalam tubuh ideologi negara itu dikandung nilai-nilai islami yang cukup kental. Lima nilai dari lima sila Pancasila, yakni: ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan dan keadilan sosial semuanya merupakan nilai-nilai yang diajarkan di dalam agama Islam (begitu pula oleh agama-agama non-Islam).

Sebagaimana piagam Madinah menjadi payung hidup bersama antarumat beragama di Madinah, Pancasila menjadi payung kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Apapun suku, agama, ras, etnis dan agamanya, semua warga Indonesia

dapat berteduh dengan rasa aman di bawah Pancasila. Pancasila menjadi titik temu antarumat beragama dan berbangsa yang mengedepankan persaudaraan.

Thaghut sendiri merupakan istilah dalam Islam yang merujuk kepada setiap sesuatu yang disembah selain Allah yang rela dengan peribadatan yang dilakukan oleh penyembah atau pengikutnya, atau rela dengan ketaatan orang yang menaatinya dalam melawan perintah Allah. Sementara orang yang meyakini ideologi Pancasila bukan berarti menyembahnya dan melawan perintah-Nya. Ideologi Pancasila menjadi payung kebersamaan antarumat beragama dalam simpul menyatukan perbedaan.

Syaikh Muhammad At-Tamimi menjelaskan siapa dan apa saja yang dianggap taghut dalam Islam. *Pertama*, iblis, yaitu bangsa jin yang diperintah Allah untuk sujud kepada Adam namun kemudian ia membangkangnya. Pertanyaannya, apakah Pancasila adalah Iblis? Tentu saja bukan. Karena Pancasila bukan makhluk bangsa jin dan juga bukan makhluk, yang memiliki sikap pembangkang.

Kedua, taghut adalah siapa yang dijadikan sesembahan dan ia menerimanya (rida). Apakah Pancasila rida untuk disembah? Tidak. Ia adalah ideologi yang menjadi landasan persatuan bangsa. *Ketiga*, siapapun yang mengajak dirinya untuk disembah oleh orang lain. Pancasila tidak pernah memerintahkan kita untuk menyembahnya. Yang patut disembah, oleh masyarakat yang berideologi bangsa Pancasila, hanyalah Tuhan Yang Maha Esa, yaitu Allah SWT.

Keempat, taghut adalah siapapun yang mengetahui perkara ghaib. Dalam konteks Pancasila, ideologi negara ini merupaka ideologi yang tidak dapat bergerak secara fisik atau

bergerak secara spiritual dengan sendirinya, sehingga ia tidak bisa mengetahui hal-hal ghaib apapun. Dan *kelima*, taghut adalah siapapun yang menggunakan hukum selain hukum Allah. Sementara menjadikan Pancasila sebagai falsafah bangsa bukanlah berhukum dengan Pancasila. Pancasila tidak dijadikan *istinbath* hukum Islam. Pancasila menjadi titik temu antarbangsa dan negara dalam kehidupan sosial warga bangsa Indonesia.

Sebaliknya, Pancasila sejalan dengan nilai-nilai Al-Qur'an. Sila *pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa*, erat kaitannya dengan firman Allah QS. Al-Baqarah [2]: 163 yang artinya: *Dan Tuhanmu adalah Tuhan Yang Maha Esa; tidak ada Tuhan melainkan Dia Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang*.

Sila *kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab*, menunjukan bahwa Pancasila mengharuskan umat manusia satu sama lain berbuat adil dan sopan santun. Ini selaras dengan al-QS. Al-Maidah [5]: 8 yang artinya: *Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.*

Sila *ketiga*, yaitu *Persatuan Indonesia*, sejalan dengan QS. Al-Hujurat [49]: 10 yang artinya: *Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.*

Sila *keempat, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan*, tepat dengan QS. Al-Maidah [3]: 159 yang artinya: *Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.*

Sila terakhir, *kelima*, yaitu *keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*, ini cocok dengan agama Islam yang mewajibkan umatnya untuk menjadi diri yang adil. Al-Quran melegalkan keadilan dalam QS. An-Nahl [16]: 90 yang artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.*

Pancasila bukanlah ideologi taghut. Pancasila tidak dijadikan sesembahan untuk melawan Dzat satu-satunya yang wajib disembah, Allah SWT. Pancasila bukan ideologi kufur, karena meski secara eksplisit bukan Islam, tapi terkandung nilai-nilai Islam yang cukup dahsyat di dalamnya. Pancasila sejalan dengan agama Islam yang mengutamakan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan dan keadilan sosial. Keberadaannya menjadi titik simpul kehidupan antarumat beragama dan berbangsa.[]

Nilai-nilai Luhur Pancasila dan Hubungannya dengan Islam

Jika di Madinah lahir konstitusi Piagam Madinah yang dipelopori oleh Nabi Muhammad SAW bersama masyarakat Madinah yang terdiri dari berbagai golongan, maka di Indonesia lahir Pancasila, ideologi yang menjadi payung keberagaman. Baik Piagam Madinah maupun Pancasila keduanya merupakan manifestasi sumber hukum Islam yang memiliki visi dan misi merekat persatuan dan kesatuan umat.

Pancasila merupakan hukum aplikatif dari hukum Allah yang kontekstual. Salah satu buktinya, rumusan Pancasila dikonsepkan sebagiannya oleh tokoh muslim, yaitu KH Wachid Hasyim yang merupakan tokoh Islam pesantren. Kita meyakini bahwa beliau tidak mungkin tidak memahami esensi Pancasila dalam kaitannya dengan nilai-nilai Islam. Sehingga klaim bahwa Pancasila merupakan ideologi kufur ialah kesimpulan yang terburu-buru.

Pancasila merupakan pedoman hidup bernegara, bukan beragama, karena dalam beragama umat Islam tetap konsisten dengan pedoman Al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Pancasila menjadi pedoman kehidupan berbangsa untuk mewujudkan kehidupan yang rukun dan damai dalam perbedaan. Sementara Al-Qur'an dan Sunnah Nabi menjadi pedoman beragama agar umat Islam taat dengan Tuhan, Nabi-Nya, dan aturan-aturan keduanya. Pancasila dibentuk untuk keselamatan semua bangsa di dunia dengan multikulturalnya, sementara kedua sumber agama ditaati supaya umat selamat dari siksaan Allah SWT kelak di akhirat.

Pancasila sebagai pedoman hidup bernegara sejalan dengan Piagam Madinah yang berisi tata-aturan hidup dalam

suatu negara tanpa meninggalkan prinsip-prinsip agama Islam. Meyakini dan menjalankan nilai-nilai Pancasila dan Piagam Madinah bukan berarti meninggalkan Al-Qur'an menjadi pedoman hidup. Bangsa yang baik sudah semestinya baik pula dalam menjalankan amanah sebagai makhluk Allah SWT. Pun demikian, lima sila Pancasila juga sarat dengan nilai-nilai Islam.

Sila pertama, *Ketuhanan Yang Maha Esa*. Sila ini menekankan setiap penduduk di negara Indonesia harus memiliki keyakinan beragama. Mereka harus menghamba kepada Tuhan Yang Satu sebagai tempat mereka kembali. Sila pertama ini menjunjung tinggi nilai-nilai kemahaesaan. Seperti itu, Allah SWT melalui QS. Al-Ikhlas [112]: 1 menjunjung tinggi nilai-nilai kemahaesaan.

Esensi dari sila pertama dan ayat Al-Qur'an di atas memberi pesan bahwa tidak boleh ada seorang pun di dunia ini yang mengesakan pendapat, termasuk mengesakan klaim Pancasila merupakan ideologi yang bertentangan dengan Islam. Semangat sila pertama dan ayat di atas adalah semangat bertauhid yang merupakan dasar utama yang wajib diyakini secara penuh oleh pemeluk agama Islam.

Sila kedua, *Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab*, menegaskan bahwa setiap orang wajib menghargai nilai-nilai kemanusiaan. Prinsip ini sejalan dengan Hadis Nabi yang menyatakan bahwa tidaklah beriman seseorang hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya. Ini juga sejalan dengan makna QS. An-Nisa [4]: 135 yang memiliki pesan kemanusiaan.

Melalui sila ini Pancasila menolak siapapun yang merendahkan kemanusiaan orang lain hanya karena berbeda

keyakinan beragama. Apalagi melakukan kekerasan hanya karena berbeda paham. Nabi Muhammad diutus untuk menyempurnakan akhlak, bukan menyempurnakan agama ataupun keyakinan. Tidak ada dasar agama setitikpun bagi mereka yang membuat kekerasan dan mengkafirkan orang lain yang berbeda ideologi. Nabi menekankan akhlak persatuan kepada semua manusia. Nabi Muhammad pernah bersabda, *al-muslimu man salima al-muslimun min yadihi wa lisânihi*; orang Islam adalah orang yang mampu menjaga tangan dan lisannya untuk tidak menyakiti orang lain.

Sila ketiga, *Persatuan Indonesia*, bangsa Indonesia wajib mendahulukan persatuan, kesatuan dan kepentingan bangsa serta negara sebagai kepentingan bersama yang harus diutamakan di atas kepentingan pribadi dan golongan. Ini sejalan dengan makna QS. Al-Hujurat [43]: 13 yang menyinggung tentang persatuan meskipun dalam ruang kehidupan masyarakat yang berbeda-beda.

Sila ini nilainya sejalan dengan praktik Nabi Muhammad SAW dalam memimpin kota Madinah. Meskipun di Madinah terdiri dari kaum yang beragam, dari mulai Islam, Yahudi, Nasrani, dan bahkan orang-orang musyrik seperti Bani Khuaza'ah dan Bani Khunainah, namun masyarakat Madinah bersatu di bawah payung perbedaan. Pun demikian dengan Indonesia sebagai negara yang dihuni oleh masyarakat yang beragam, kiranya tepat menggunakan ideologi Pancasila sebagai titik temu antar perbedaan-perbedaan yang dimiliki.

Sila keempat, *Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmah Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan dan Perwakilan*, memberi pesan bahwa setiap orang Indonesia memiliki kedudukan, hak dan kewajiban sebagai warga bangsa. Saat

mereka menghadapi persoalan hendaknya diselesaikan melalui jalan musyawarah untuk menemukan solusi terbaik. Ini sejalan dengan QS. Syura [52]: 38 yang mengharuskan umat Islam bermusyawarah dalam menghadapi sebuah perkara.

Semangat sila keempat yang sejalan dengan ayat Al-Qur'an ini menolak sistem totalitarianisme dan otoritarianisme dalam pemerintahan. Sebab sistem tirani ini bertentangan dengan nilai Al-Qur'an yang menolak kepemimpinan hanya dipegang oleh kepentingan individu yang akan menyalahgunakan kepentingan rakyat. Gambaran ini oleh Al-Qur'an dilukiskan oleh sosok Fir'aun sebagai pemimpin yang otoriter, dan menolak nilai-nilai musyawarah. Maka siapapun yang menolak sila ini secara otomatis telah mendukung sistem otoriter yang jelas-jelas merupakan sistem kufur dan ditentang Al-Qur'an.

Sila kelima, *Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia*. Dengan sila ini seluruh bangsa Indonesia harus berjiwa adil. Ini sejalan dengan QS. An-Nahl [16]: 90 yang mengharuskan umat Islam berlaku adil kepada semua alam. Sila yang secara esensial sejalan dengan Al-Qur'an ayat di atas ini bertolakbelakang dengan penjajahan dan penindasan sebab tidak berkeadilan. Maka tindakan dan perilaku yang menindas orang lain atas dasar apapun, apalagi dengan mengatasnamakan Islam, sejatinya merupakan musuh Islam dan musuh bangsa Indonesia yang sesungguhnya. Pancasila dan Islam menolak tindakan penindasan karena tidak sejalan dengan pesan mulia Al-Qur'an.

Dengan pendasaran Al-Qur'an atas Pancasila di atas jelas bahwa ideologi negara Indonesia ini tidak sama sekali kufur. Ia berkait erat dengan semangat Islam, Al-Qur'an dan semangat kemanusiaan. Siapapun yang menolak prinsip keesaan, menolak

kemanusiaan, memecahbelah persatuan, mengadopsi sistem otoritarianisme meski atas nama Islam atau *khilafah*, dan menghancurkan nilai-nilai keadilan, sesungguhnya merekalah yang tidak memiliki tempat dalam agama Islam dan Al-Qur'an. Meskipun secara tertulis Pancasila bukan bernamakan sistem Islam, ia merupakan ideologi negara, pedoman dalam bernegara, yang sejalan dengan nilai-nilai Islam. Itu lebih utama dibanding mengatasnamakan sistem Islam, *khilâfah Islam*, tetapi tidak disadari di dalamnya sarat akan kekerasan, otoriter dan keluar dari nilai-nilai Islam.[]

Pancasila, Piagam Madinah dan Gagal Paham Para Pengasong *Khilafah*

Hingga hari ini masih ada sekelompok orang yang mengaku beragama Islam namun gemar mencemooh kelompok lain yang berbeda paham dan keyakinan. Kemunculan kelompok ini sudah sejak lama diwanti-wanti oleh Rasulullah. Mereka gemar mengaku paling beragama, tetapi abai dengan persatuan umat manusia. Mereka terlihat Islam secara simbolik, namun perangai dan perilakunya tidak islami.

Mereka gemar menggunakan atribut kalimat tauhid, mengaku memperjuangkan sistem negara Islam, di mana-mana bicara syariah, namun mereka kerap mengkafir-kafirkan Pancasila, sebuah ideologi negara yang menjadi titik temu keragaman Indonesia. Dengan menganggap Pancasila bukan Islam, mereka sesungguhnya telah gagal paham memahami ideologi yang sejatinya sarat nilai-nilai Islam itu.

Pancasila merupakan satu bentuk ijtihad *founding fathers* negara Indonesia. Dalam kajian Ushul fiqh, suatu ijtihad baru tidak bisa membatalkan ijtihad lain yang lebih dulu lahir. Dari persoalan yang sederhana inilah sebetulnya para pengasong *khilafah* gagal memahami dasar Islam.

Jika para pengasong *khilafah* tidak menganggap islami ideologi Pancasila karena tidak ada dalil dalam Al-Qur'an, Piagam Madinah juga tidak sama sekali disebutkan di dalam Al-Qur'an. Apakah para pengasong *khilafah* akan menganggap Piagam Madinah sebagai produk kufur yang sama sekali tidak disebut dalam teks suci agama? Nyatanya mereka tidak demikian, mereka menganggap Piagam Madinah sistem Islam, bahkan

diklaim sebagai embrio sistem *khilafah*. Kalau mau konsisten, mereka semestinya tidak mengkafirkan baik Piagam Madinah maupun Pancasila. Keduanya sama-sama tidak disebutkan secara tersurat di dalam Al-Qur'an dan Hadis Nabi.

Piagam Madinah sendiri merupakan konstitusi bersama antar orang-orang Islam dengan umat beragama lainnya di Madinah, seperti kaum Yahudi, Kristen, Nasrani, bahkan kaum Pagan. Kelompok Islam di negeri tersebut juga beragam, diantaranya kaum Ansor, Muhajirin, Bani Quraidah, Bani Qainuqa' dan Bani Nadhir. Multikultural Madinah diikat dengan Piagam Madinah agar bersatu dalam perbedaan. Keragaman di Madinah disadari atau tidak mirip dengan konteks keragaman di Indonesia, negara yang dihuni oleh beragam kelompok, baik kelompok agama, etnis, suku, budaya, maupun adat. Bangsa Indonesia diikat dengan Pancasila, ideologi yang menaungi semua kelompok, sebagaimana Nabi mengikat multikulturalisme Madinah dengan Piagam Madinah.

Piagam Madinah dan Pancasila seperti dua kesamaan yang hanya beda konteks saja. Baik Piagam Madinah maupun Pancasila keduanya diinisiatifkan agar setiap orang dengan perbedaan latar belakangnya dipastikan mendapat tempat yang baik dan diperlakukan dengan layak di negerinya masing-masing. Suaranya didengar oleh para pemimpinnya.

Pada peristiwa Perjanjian Damai antara orang Islam dan Yahudi (Hudaibiyah), ada seorang laki-laki bernama Suhail. Ia datang sebagai wakil dari kelompok Yahudi. Dalam perjanjian yang ditulis di atas kertas itu ia tidak setuju dengan kalimat "Rasulullah" dan "*Bismillah arrahman arrahim*". Meski demikian Rasulullah, sebagai perwakilan umat muslim tidak menolak usulan Suhail, justru menerima masukan dan kritikannya.

Rasulullah tidak selalu mendahulukan simbol-simbol Islam dalam situasi dimana yang diperlukan lebih utama adalah penghargaan terhadap keberagaman. Nabi mengutamakan kemanusiaan dalam visi hidup damai dibanding sekadar simbol Islam namun umat agama lain menolak dan berpotensi timbulnya perseteruan yang tidak ada hentinya. Pun demikian dalam konteks Pancasila, meskipun bukan sistem yang lahir dari dunia Islam, namun lima sila Pancasila sarat dengan penghargaan kepada kemanusiaan, visi perdamaian, dan menghargai semua agama.

Yudi Latif, sang maestro kajian Pancasila menegaskan, Pancasila adalah "agama", agama dalam arti bukan wahyu. Ia adalah sebuah pedoman yang hadir di tengah-tengah agama yang beragam yang kedudukannya tidak untuk memberantas agama-agama sebelumnya. Demikian itu menemukan titik temunya juga dengan Piagam Madinah, dimana kehadirannya menjadi benang merah agama-agama dan keragaman penduduk Madinah untuk bersatu dalam negara kota Madinah. Baik Pancasila maupun Piagam Madinah sama-sama memiliki ontologi yang seirama, yaitu usaha mencari titik temu di tengah multikulturalisme. Keduanya merupakan perangkat yang dapat menghargai dan menjunjung tinggi semua agama, semua suku, ras, golongan, dan semua perbedaan dalam sebuah bangsa, sebagaimana bangsa Madinah dan bangsa Indonesia.

Selain ontologi titik temu, Piagam Madinah dan Pancasila adalah dua entitas yang juga bermuara sama dalam satu tujuan mengedepankan musyawarah dalam mencari titik temu yang dimaksudkan. Keduanya membuka pintu masuk berupa masukan, kritikan, dan saran, yang kesemuanya diadakan dalam rangka menuju kebaikan bersama. Para ilmuan menganggap Piagam

Madinah adalah sistem negara terbaik dan modern pada zamannya yang terus relevan digunakan untuk masa kini. Tidak berlebihan jika dikatakan preseden Piagam Madinah sesungguhnya telah menyejarah ke Indonesia, sebagai bangsa yang multikultural dan dianugerahi sebuah ideologi yang mampu menghasilkan kebaikan bersama bangsa Indonesia dalam keberagamannya.

Kenyataan demikian berbeda dengan sistem *khilafah*, dimana sistem tersebut identik dengan sistem yang diskriminatif, menomorduakan status perempuan, mengkebiri status non-muslim, dan mengkerdilkan siapa saja yang tidak taat pada otoritarisme pemimpin. *Khilafah* selain sebagai sistem gagal, juga tidak bisa mengakomodir perbedaan dan keragaman secara seirama, dan tidak layak digunakan di negara manapun. Sistem tersebut bertentangan dengan semangat Piagam Madinah. Kelompok pengusung *khilafah* gagal paham dalam memaknai Pancasila. Pancasila adalah Piagam Madinah yang lain dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.[]

Tafsir 5 Pancasila dalam Tinjauan Humanisme Islam

Setiap masyarakat dalam suatu negara memiliki nilai-nilai yang menjadi pedoman hidupnya. Masyarakat Indonesia memiliki Pancasila sebagai pedoman melaksanakan tugasnya sebagai warga bangsa. Pancasila menjadi dasar dalam mengatur pemerintahan dan pula menjadi sumber hukum positif. Pancasila juga merupakan pandangan hidup yang dirumuskan sebagai falsafah kehidupan berbangsa dan bernegara. Tidak hanya digagas oleh satu golongan, Pancasila dibentuk atas dasar kesepakatan berbagai kelompok. Tujuan utama dibentuknya menjadi landasan pemersatu bangsa Indonesia yang terdiri dari beragam suku, ras, budaya, dan agama.

Meskipun demikian masih ada sementara orang yang menolak Pancasila. Pancasila dianggap sebagai falsafah hidup yang tidak islami yang tak semestinya diyakini orang Islam. Menurutnya, umat Islam harus menolak Pancasila dan menggantinya dengan hukum Islam. Sementara orang itu mengklaim Pancasila sebagai ideologi yang bertentangan dengan Islam sebab tidak termaktub secara tersurat di dalam nash Al-Qur'an maupun Hadis Nabi. Kelompok ini yang kemudian menawarkan konsepsi dan ideologi politik mengatasnamakan perintah agama. *Khilafah Islamiyah* dan NKRI bersyariah menjadi tawaran pengganti Pancasila atas dasar sistem tersebut dinilai lebih islami. Dengan pemahamannya yang ekstrim, mereka meyakini Pancasila dan NKRI harus diganti dengan 'Islam' versi kelompoknya.

Faktanya, Pancasila yang terdiri dari lima sila tidak sama sekali bertentangan dengan Islam. Pada sila *pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa*, masyarakat Indonesia memiliki dasar bahwa

setiap orang harus beragama dengan menyembah Tuhan Yang Satu. Setiap manusia memiliki insting keberagamaan dalam dirinya. Di dalamnya terkandung emosi, rasa takut, cemas, cinta, kesetiaan dan lainnya. Manusia merasa bahwa semua itu harus dikembalikan kepada kekuatan Dzat Yang Maha Besar dengan cara berhubungan baik dengan-Nya. Sila ini juga meniscayakan adanya toleransi beragama, dimana masing-masing pemeluk agama memiliki legitimasi di bawah Ketuhanan Yang Maha Esa. Apapun agama dan keyakinannya, jika meyakini Tuhan yang Esa, maka ia berhak hidup dan bertahan di Indonesia.

Melalui sila *kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab*, setiap manusia memiliki keinginan diperlakukan secara adil dan beradab baik jasmani ataupun rohaninya. Sila kedua ini terafirmasi oleh hadis Nabi Muhammad yang artinya, "*Seseorang tidak mencapai peringkat sempurna dari iman kecuali jika ia mencintai/menyukai saudaranya atas apa yang ia cintai untuk dirinya*." Kemanusiaan dan keadilan ini juga dikonfirmasi oleh Al-Qur'an dalam surah Ad-Dhuha (surah ke 93). Di sana Allah melarang manusia berbuat semena-mena pada anak Yatim, disusul dengan larangan menghardik orang yang miskin, baru kemudian Allah peringatkan manusia untuk selalu bersyukur atas nikmat yang telah Ia berikan. Itu artinya, Allah mendahulukan mementingkan masalah kemanusiaan dari pada mementingkan urusannya langsung dengan-Nya.

Sila *ketiga, persatuan Indonesia*, menjadi amat penting bagi masyarakat Indonesia yang lahir sebagai bangsa yang beragam dan multikultural. Persatuan juga ditekankan oleh Allah melalui ayat suci-Nya. Allah melarang hamba-Nya melakukan perpecahan dan perselisihan (QS. Al-Anfal Ayat 46). Bahkan Allah seringkali membarengi nilai persatuan dengan keimanan,

sementara perpecahan dengan kekufuran (QS. Ali Imran Ayat 106). Sila ke empat, *Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Persmusyawaratan Perwakilan* juga sejalan dengan nilai Islam. Orang yang diberikan hikmah, kata Allah, ia akan diberikan kebaikan yang melimpah (QS. Al-Baqarah Ayat 269). Kitab suci umat Islam ini juga memerintahkan untuk bermusyawarah (QS. Ali Imran Ayat 135) dan memuji orang yang melakukannya (QS. As-Syura Ayat 38).

Dan sila *kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia*. Adil berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya. Keadilan sosial menuntut persamaan dalam keseimbangan antara hak dan kewajiban setiap bangsa. Dalam konteks Indonesia peran pemerintah sangat mutlak dalam mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia ini. Sila kelima ini didukung oleh Allah melalui salah satu firman-Nya, Allah berfirman yang artinya, "*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran*." (QS. An-Nahl Ayat 90).

Klaim sementara orang yang menyatakan Pancasila sebagai ideologi taghut merupakan kesimpulan yang cacat logika. Asumsi tersebut merupakan kesimpulan yang tidak didasari dalil-dalil yang kuat. Orang yang beranggapan demikian menurut Imam Ali RA ialah mereka yang mengkampanyekan kalimat yang hak tetapi untuk kepentingan sesuatu yang batil. *Wallahu A'lam*.[]

ISLAM DAN DEMOKRASI

Memaknai Demokrasi dalam Islam

Demokrasi masih dan akan selalu menjadi sistem tata negara Indonesia, karena merupakan sistem yang hingga saat ini paling tepat untuk dipilih dan digunakan dengan fakta keragaman yang dimiliki bangsa Indonesia. Demokrasi sendiri berakar dari bahasa Yunani, yaitu 'Demos' yang artinya rakyat, dan 'Cratos' yang maknanya adalah kekusaaan. Keduanya digabungkan menjadi ‘Demokrasi’ yang berarti kekuasaan di tangan rakyat. Itu sebabnya negara dengan sistem demokrasi kedaulatannya berada di tangan rakyatnya.

Nahasnya sistem demokrasi di Indonesia kerapkali dituduh sebagai sistem kufur. Sistem tersebut kerap diklaim sebagai sistem yang tidak sesuai dengan tatanan Islam. Oleh para penyeru *khilafah*, sistem ini terus diprovokasi sebagai sistem yang tidak layak digunakan oleh orang Islam maupun oleh negara dengan penduduk mayoritas muslim, termasuk oleh Indonesia. Dengan memaknai secara simbolik, para penyeru *khilafah* mengharamkan sistem yang hingga hari ini paling ideal digunakan di Indonesia tersebut.

Islam merupakan agama yang menekankan kepada nilai-nilai, bukan sekadar simbol (simbol-simbol agama). Mengutip pernyataan KH Said Aqil Siradj, seseorang yang selalu mengagungkan simbol agama, seringkali ia melupakan esensinya. Seolah-olah simbol dan atribut seseorang menjadi parameter keberislamannya tanpa perlu dilihat akhlak dan perilakunya.

Nabi Muhammad SAW sendiri merupakan pribadi yang demokratis. Ketika beliau berada di Madinah dan hendak menjadi pemimpin negeri tersebut, bersama para sahabat-sahabatnya ia

membuat kelompok atau partai (*Hizb* dalam istilah Al-Qur'an). Bersama para sahabatnya, Nabi melobi pimpinan-pimpinan kelompok massa di Madinah, baik muslim maupun non-muslim, agar mereka menyepakati beliau menjadi pemimpin di Madinah. Kepiawaian Nabi dalam melobi menjadikan beliau dipilih dan disetujui menjadi pemimpin negeri tersebut. Ini kemudian berlanjut dengan adanya kesepakatan dibuatnya piagam Madinah, yang menjadi dasar kehidupan umat di Madinah di bawah kepemimpinan sang Rasulullah.

Potret di atas menunjukan bahwa nilai-nilai demokrasi amat kental dalam sejarah Islam, bahkan dicontohkan secara sempurna oleh Baginda Rasulullah ketika hendak dan pasca menjadi pemimpin di Madinah. Proses yang dilakukan oleh Nabi dan sahabatnya membuktikan bahwa Islam tidak sekadar memerintah umatnya beribadah secara ritual saja, tetapi juga menyeru hal-hal yang baik dalam berpolitik dengan cara yang demokratis.

Di lain kesempatan, kerapkali para penyeru *khilafah* menolak demokrasi karena alasan kekuasaan ada di tangan rakyat, bukan di tangan Tuhan. Pertanyaannya, apa yang salah? Di mana letak kekeliruannya? Adakah sistem negara di dunia yang tidak diatur melalui menejemen manusia? Pada masa ke-*khilafahan* pun, semua pemimpin dipilih oleh keputusan manusia, bukan langsung dipilih oleh Tuhan. Soal klaim bahwa Al-Qur'an memiliki sistem tertentu, itu juga merupakan interpretasi manusia atas teks agama. Pada faktanya, semua sistem negara dalam bentuk apapun butuh interpretasi dari tangan-tangan manusia.

Islam merupakan agama yang diturunkan oleh Allah SWT melalui Nabi Muhammad guna mengatur manusia, yang dalam Al-Qur'an diistilahkan dengan bangsa dan *kabilah* (*syu'uban wa*

qabaila). Umat manusia diamanahkan menjadi *khalifah* di muka bumi guna mengatur urusan di bumi, termasuk membuat sistem berbangsa dan bernegara. Adanya tangan-tangan manusia membentuk sistem negara merupakan *sunnatullah* dan juga manusiawi.

Menolak demokrasi atas dasar bahwa ia merupakan sistem yang lahir dari Barat sehingga diklaim kufur adalah tindakan cacat logika. Islam memiliki model dan representasi soal sistem negara yang amat sempurna. Representasi demokrasi dalam Islam tidak sama dengan demokrasi di Barat, yang kering akan nilai-nilai Islam. Demokrasi dalam Islam sarat dengan nilai-nilai kemanusiaan dan juga nilai-nilai spiritual.

Demokrasi merupakan sistem terbaik yang saat ini relevan digunakan bangsa Indonesia. Ketentuannya berasal dari kreativitas warganya. Umat Islam memiliki peran penting di dalam sistem tersebut. Jika umat Islam diam, apalagi alergi dengan simbol Barat, maka demokrasi hanya akan dipresentasikan dengan sistem yang kering dari nilai-nilai agama. Tetapi jika umat Islam bergerak, semangat, dan menjalankan nilai-nilai demokrasi dengan mengharmonikan nilai-nilai Islam, maka demokrasi akan menjadi kejayaan Islam. Demokrasi akan menjadi sistem yang mengayomi seluruh umat manusia, sebagai representasi demokrasi yang islami.[]

Hubungan Islam dan Demokrasi

Sistem demokrasi menjadi sistem yang dipilih oleh *founding fathers* bangsa Indonesia guna menjalankan roda negara. Dipilihnya demokrasi karena ia merupakan sistem yang memberikan perlindungan kepada setiap individu masyarakat, menghindari otoritarian pemerintah dan memberikan kebebasan kepada hal-hal yang positif. Demokrasi sejalan dengan nilai-nilai agama yang mengapresiasi musyawarah dan keadilan bagi warga negara.

Kedudukan demokrasi dan Islam secara kasat mata memang seolah-olah merupakan dua hal yang bertentangan. Islam sebagai wahyu dari Allah SWT, sementara demokrasi merupakan hasil pemikiran manusia. Keduanya lahir dari rahim yang berbeda, meskipun secara logika dua hal yang berbeda tidak selamanya bertentangan satu dengan yang lainnya.

Islam merupakan agama yang apresiatif terhadap nilai-nilai moral dan etika umatnya. Islam tidak menuntut umatnya untuk mendahulukan simbol dan mengesampingkan esensi suatu ajarannya. Betapa Rasulullah SAW menjadi pribadi yang apik dalam mewujudkan nilai-nilai esensial umatnya dibandingkan simbol-simbol Islam semata. Rasulullah mengutamakan etika, moral, dibandingkan hanya mengutamakan tindakan faktual namun lepas dari nilai dan esensial agama.

Sidney Hook dalam *Encyclopaedia Americana* mendefinisikan demokrasi sebagai suatu bentuk pemerintahan dimana keputusan-keputusan pemerintah baik secara langsung maupun tidak didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa.

Demokrasi menuntut nilai-nilai kebebasan kemanusiaan dengan tetap mempertimbangkan nilai, etika dan moral.

Secara esensial, demokrasi mengedepankan prinsip musyawarah, keadilan, persamaan, amanah dan tanggung jawab. Prinsip-prinsip dasar tersebut diafirmasi oleh Al-Qur'an. *Musyawarah* misalnya, sejalan dengan QS. Ali Imran: 59, "*Dan bermusayawarahlah dengan mereka dalam urusan itu*". Prinsip keadilan dalam Demokrasi juga di apresiasi oleh Al-Qur'an QS. An-Nahl: 90, "*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang berbuat keji, kemungkaran dan permusuhan*".

Prinsip persamaan dalam demokrasi juga dikonfirmasi oleh ayat-ayat Al-Qur'an, salah satunya oleh QS. Al-Hujurat: 49, "*wahai manusia, sesungguhnya kami telah menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian dapat saling mengenal. Dan orang yang paling mulia di antara kalian adalah mereka yang paling bertakwa".*

Prinsip selanjutnya yaitu amanah, sejalan dengan maksud ayat Al-Qur'an QS. An-Nisa': 58, "*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu supaya menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil*". Sedangkan prinsip yang terakhir, tanggung jawab, dikonfirmasi oleh hadis Nabi Muhammad SAW bahwa kita semua adalah pemimpin. Dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban.

Tidak sepenuhnya salah jika dikatakan demokrasi merupakan sistem yang lahir dari rahim pemikiran manusia. Namun salah kaprah jika kemudian dipertentangan dengan Islam.

Islam diturunkan untuk manusia. Manusia diberikan akal untuk berijtihad, dituntut untuk menggunakan akalnya untuk berkreasi dalam beragama guna menemukan kemaslahatan yang besar. Dan, demokrasi merupakan produk ijtihad terbaik saat ini bagi bangsa Indonesia yang dihuni oleh keberagaman umat manusia. Secara khusus, demokrasi juga erat kaitannya dengan Islam karena prinsip-prinsipnya tidak ada yang bertentangan dengan ajaran Islam [].

Kemuliaan Islam di Bawah Demokrasi

Islam agama yang sempurna. Ditempatkan di posisi manapun Islam tetap merupakan agama yang mulia. Bentuk kemuliaan Islam salah satunya terletak pada kesempurnaannya dibanding dengan agama dan keyakinan lain. Wajar jika kemudian Gus Dur menyebut *Islam tak perlu dibela*. Yang perlu dibela adalah mereka-mereka yang ditindas, diperlakukan dengan kekerasan dan diintimidasi. Islam dengan sendirinya memiliki kemuliaan dan derajat tinggi dalam kondisi dan situasi apapun.

Dalam konteks negara demokrasi Islam juga memiliki kedudukan yang mulia. Di negara demokrasi Islam menjadi agama yang tidak dicampakan ajarannya. Dalam konteks Indonesia, Islam menjadi agama yang paling dimuliakan karena menjadi agama yang dianut oleh mayoritas dan agama yang paling banyak memiliki umat. Umat Islam juga tidak pernah diusik untuk beribadah, apalagi diusir dengan alasan negara menggunakan sistem demokrasi. Tidak relevan menyatakan Islam bertentangan dengan demokrasi karena keduanya saling bersinergi memberikan kemaslahatan untuk umat.

Di bawah naungan demokrasi nilai-nilai Islam teraplikasikan dengan baik. Sebagaimana demokrasi yang identik dengan musyawarah, keadilan dan tanggung jawab, Islam juga merupakan agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai tersebut. Di bawah sistem demokrasi dan nilai-nilai Islam pemimpin dan yang dipimpin dituntut bermusyawarah dalam menentukan dan menerima kebijakan untuk kemaslahatan umat manusia. Di dalam ajaran Islam maupun demokrasi tidak boleh ada ketidakadilan baik itu dirasakan oleh masyarakat kelas bawah atau

pemimpinnya. Meskipun demikian, pemimpin tetap menjadi garda depan bertanggungjawab atas persoalan yang menimpa masyarakat. Nilai-nilai Islam berupa musyawarah, keadilan dan tanggungjawab terpenuhi dengan maksimal di bawah demokrasi.

Di bawah negara demokrasi, ajaran Islam pun dapat ditampilkan dengan leluasa. Umat Islam bebas melangsungkan ibadah apapun dan di manapun. Tidak ada satu ibadah yang dilarang oleh pemimpin suatu negara yang menerapkan sistem demokrasi. Bahkan umat Islam seperti dianakemaskan oleh negara demokrasi sebagai umat mayoritas. Umat Islam memiliki Kementerian Agama, yang walaupun dibentuk untuk semua agama, tetapi tetap saja identik dengan Kementerian Agama Islam. Umat Islam bebas membuat masjid di manapun. Mereka tak dilarang melaksanakan shalat di mana saja tanpa rasa takut untuk dibubarkan.

Negara demokrasi identik dengan negara yang inklusif, demokratis dan terbuka. Karena itulah inti negara demokrasi dalam Islam diistilahkan dengan kata *syûrâ* (musyawarah). Pemimpin dapat menentukan kebijakan setelah berembug bersama para wakil rakyat. Begitu pula rakyat dapat menerima atau menolak kebijakan pemimpin ketika lahir sebuah tata aturan atau undang-undang yang tidak memihak rakyat. Ini berbeda dengan *khilafah* yang lebih ekslusif hanya satu arah. Pemerintah dalam *khilafah* bersifat otoriter dalam memutus kebijakan. Nilai ini bertentangan dengan Islam yang mengajarkan nilai-nilai musyawarah dan keadilan.

Bukti lain kemuliaan Islam di bawah negara demokrasi adalah keluesannya dengan agama-agama lain. Islam menjadi agama yang tidak kaku dan rigid di bawah naungan demokrasi. Ia bisa bergandengan tangan dengan agama-agama lain dalam

rangka sama-sama memberikan kemaslahatan bagi masyarakat. Toleransi dengan agama-agama lain merupakan ajaran Islam yang menjadi bukti kasih Islam kepada semua manusia dengan perbedaannya. Sebagaimana negara demokrasi yang identik dihuni oleh kelompok manusia yang berbeda-beda latar belakang, Islam sejalan dengan demokrasi yang mengedepankan nilai-nilai toleran dan moderat.

Islam mulia dan dimuliakan di bawah sistem demokrasi. Nilai-nilanya menyeruak di sudut-sudut sistem negara tersebut. Ibadah umatnya diizinkan secara cuma-cuma. Kehidupan saling hormat menghormati antarpemeluk agama terwujud dengan baik. Islam di bawah demokrasi menemukan nafas keagungannya. Tidak ada diskriminasi Islam di bawah demokrasi. Islam dan demokrasi menjadi dua saudara kembar yang berjalan bergandengan tangan memberikan kemaslahatan untuk banyak orang.[]

Demokrasi vs Khilafah; Mana Produk Hukum Allah?

Segala sesuatu yang ada di muka bumi merupakan kehendak dan kekuasaan dari Allah SWT. Tidak ada sesuatupun yang telah menjadi perbincangan umat manusia yang lepas dari kekuasaan-Nya. Dalam istilah filsafat fenomena ini disebut dengan kesatuan wujud (*wahdat al-wujûd*). Termasuk hal ini adalah ketetapan sistem bernegara yang dianut oleh negara-negara di dunia. Semua sistem negara tidak bisa dilepaskan dari peran Allah. Jika meyakini ada hal di dunia yang lepas dari peran-Nya sama saja dengan meyakini ada Pencipta selain Allah.

Namun ketika sistem dalam sebuah negara sudah disetir oleh manusia maka tidak ada sistem yang bisa lepas dari campur tangan makhluk-Nya. Termasuk sistem demokrasi dan *khilafah*. Sidney Holk dalam *Encyclopedia American* mendefinisikan demokrasi sebagai suatu bentuk pemerintahan di mana keputusan-keputusan pemerintah secara langsung maupun tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas rakyat dewasa. Sedangkan esensi demokrasi dalam cara pandang Islam mengacu kepada sistem musyawarah sebagaimana ditegaskan dalam QS. Ali Imran [4]: 159).

Agama Islam adalah agama yang inklusif dan demokratis. Ajaran-ajarannya dapat diimplementasikan kepada masyarakat secara aktual dan kontekstual di tengah kehidupan mereka. Pada posisi inilah sistem demokrasi merupakan sistem yang secara esensial merupakan produk hukum Tuhan akan tetapi telah diterjemahkan ke muka bumi dengan campur tangan manusia yang merupakan makhluk-Nya.

Praktik hidup yang demokratis ini telah dipraktikkan secara baik oleh Nabi Muhammad SAW semasa memimpin

Madinah. Sebagai suatu bangsa, secara esensial Madinah menerapkan sistem demokrasi dengan kewenangan hukum yang dilahirkan melalui hasil musyawarah antara kelompok Ansar, Muhajirin, Yahudi, Nasrani dan kelompok lainnya. Melalui Piagam Madinah, hukum yang berlaku di Madinah merupakan hasil kesepakatan umat manusia di bawah kendali Rasulullah SAW.

Selain prinsip musyawarah, demokrasi memiliki nilai-nilai lain yang juga menjadi ciri khasnya, seperti amanah (amanah pemimpin kepada rakyat), keadilan (keadilan hukum bagi seluruh warga) dan tanggung jawab (baik tanggung jawab pemimpin pada rakyatnya atau sebaliknya). Dalam negara demokrasi pemimpin dan rakyat berkolaborasi sama-sama membangun peradaban terbaik bagi negara. Dengan kata lain, secara esensial nilai-nilai demokrasi merupakan hukum Tuhan yang mengkonfirmasi nilai musyawarah, amanah, keadilan dan tanggung jawab. Namun secara aplikatif, demokrasi tidak bisa lepas dari peran manusia.

Sebagaimana demokrasi, *khilafah* juga merupakan sistem yang tidak bisa lepas dari peran manusia. *Khilafah* dalam arti sistem kepemimpinan yang pernah dipraktikan oleh empat *khulafa al-rasyidun* pasca wafatnya nabi dan khalifah-khalifah setelahnya bukanlah sistem yang murni hukum Allah. *Khilafah* merupakan sistem yang dibentuk oleh manusia pada masanya karena memang sesuai dengan konteksnya. Sehingga memaksakan sistem *khilafah* pada masa yang tidak pada konteksnya merupakan perbuatan yang sia-sia.

Umat Islam tidak bisa menutup-nutupi bahwa *khilafah* memang pernah dipraktikan oleh umat Islam di masanya. Di

dalamnya ada nilai-nilai Islam jika kepemimpinannya sesuai dengan prinsip-prinsip Islam seperti keadilan sosial dan musyawarah. Nilai-nilai demikian merupakan hukum Allah yang jika diejewantahkan di masyarakat akan memberikan kemaslahatan. Namun demikian *khilafah* juga memiliki sisi kekurangan, ada bidang-bidang yang belum sempurna diimplementasikan, masih ada sisi-sisi kemiskinan di tengah masyarakat dan juga ketidakadilan di masa kekhilafahan.

Lebih dari itu menyakini bahwa *khilafah* merupakan sistem yang murni merupakan hukum Allah adalah sebuah penghinaan kepada Tuhan yang merupakan Dzat Yang sempurna. Adanya sisi-sisi kekurangan selama masa ke-*khilafa*-an membuktikan bahwa *khilafah* bukan murni hukum Tuhan.

Baik demokrasi maupun *khilafah* keduanya memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Sisi kelebihannya keduanya berpotensi melahirkan hukum-hukum yang memberikan kemaslahatan di tengah masyarakat. Sisi inilah yang merupakan hukum Tuhan. Namun keduanya juga memiliki kekurangan. Baik demokrasi atau *khilafah* memiliki catatan kekurangan di berbagai bidangnya, karena kesempurnaan memang hanya milik Allah. Maka tidak selayaknya mengklaim salah satunya sebagai sistem yang murni turun dari Allah. Yang lebih esensial dan lebih utama untuk digunakan adalah mana yang lebih kontekstual dan besar kemaslahatannya. Pada posisi inilah demokrasi lebih utama diimplementasikan di masa sekarang dibanding *khilafah*, sebab demokrasi lebih dapat memberikan kemaslahatan untuk bangsa yang beragam seperti bangsa Indonesia.[]

Cacat Nalar Klaim Demokrasi Sistem Kafir dan Sistem Dajjal

Dunia Islam sejak tahun 1924 M telah menolak sistem *khilafah*. Sistem ini ditolak karena dinilai tidak lagi memberikan kemaslahatan kepada umat manusia. Sistem *khilafah* hanya melahirkan permusuhan antar pemimpin, bahkan saling mengkudeta satu sama lain. Sejarah telah mencatat misalnya, Abdullah Ibn Muljam (tokoh Khawarij) memenggal kepala cucu Rasulullah Sayyidina Husain karena perbedaan politik. Kasus lain, Hajjaj Bin Yusuf, salah satu Gubernur di masa kekhilafahan Bani Umayyah memblokade kota Mekkah dan menghujani penduduknya dengan panah api hingga Ka'bah terbakar. Tindakan para pemimpin tersebut dilatarbelakangi kepentingan politik di bawah naungan *khilafah*. Dunia pun berbondong-bondong meninggalkan sistem usang tersebut dan menggantinya dengan sistem demokrasi.

Dipilihnya demokrasi menjadi sistem tatanegara di negara-negara dengan penduduk mayoritas muslim, karena demokrasi sesuai dengan visi agama Islam yang menghargai pendapat/musyawarah setiap individu. Demokrasi sejalan dengan tatanan hidup islami yang mengedepankan keadilan baik bagi pemimpin atau rakyatnya. Lebih dari itu secara esensial, sistem demokrasi sudah dipraktikan oleh Nabi Muhammad ketika memimpin Madinah. Nabi Muhammad memberikan peluang kepada setiap individu dan kelompok yang ada di Madinah untuk bersuara menyampaikan pandangan dan pendapatnya meskipun latar belakang suku, ras, budaya, dan agama mereka satu sama lain berbeda.

Mengklaim demokrasi sebagai sistem kufur atau sistem Dajjal adalah pernyataan yang tidak mendasar. Memang secara penamaan demokrasi lahir dari dunia Barat. Tetapi muslim yang cerdas tidak perlu menolak begitu saja nilai-nilai yang ada di dalamnya. Pun demikian tidak mengadopsi secara keseluruhan apa-apa yang lahir dari Barat tersebut. Nabi Muhammad mengajarkan umat Islam untuk belajar dan mengambil inspirasi dari siapapun dan dari manapun. Jika pun demokrasi diklaim sebagai sistem yang bukan lahir dari Islam, bukankah orang pertama yang mengabarkan kerasulan Nabi Muhammad, yaitu Waraqah bin Naufal juga bukan orang Islam? Faktanya, banyak hal di luar Islam yang telah diadopsi umat Nabi Muhammad, seperti sistem pendidikan, sistem belajar di pesantren, dan lain sebagainya.

Tuduhan bahwa demokrasi merupakan sistem kafir adalah tindakan yang tidak mendasar. Sistem sebuah negara, apapun namanya, merupakan sistem yang mati, ia tidak bisa bergerak sendiri kecuali digerakan oleh manusia. Sementara istilah kafir berarti seseorang yang menutup dan menolak kebenaran yang ia ketahui. Mempredikatkan sebuah sifat yang hakikatnya hanya untuk sesuatu yang berakal kepada sesuatu yang tidak berakal merupakan kesalahan berfikir yang akut. Istilah kafir hanya bisa dipredikatkan kepada “orang-orang” yang menutupi kebenaran, bukan kepada sesuatu yang tidak berakal, termasuk sistem dalam sebuah negara.

Sedangkan istilah Dajjal dipakai untuk penamaan tokoh dalam eskatologi Islam yang akan muncul ketika hari kiamat datang. Ia seseorang yang gemar memfitnah dan berbohong. Dengan kata lain, istilah Dajjal juga hanya dapat dipredikatkan kepada orang atau subjek yang bernyawa. Mempredikatkan

istilah Dajjal pada sistem, termasuk sistem demokrasi adalah sebuah pernyataan yang cacat logika, sama seperti Anda menyatakan 'motor yang rajin' atau 'laptop yang cerdas'. Sesuatu yang mati tak bisa dipredikasikan dengan sifat yang khusus untuk yang berakal.

Selain itu, Dajjal dalam keyakinan orang Islam akan muncul pada hari datangnya kiamat. Sebelum kemunculan Dajjal, manusia akan diuji dengan kemarau dan kelaparan, dan musnahnya pepohonan selama tiga tahun berturut-turut. Hewan ternak di dunia semuanya mati. Pertanyaannya, apakah peristiwa-peristiwa ini sudah muncul di sekitar kehidupan kita? Sehingga bisa untuk mengklaim bahwa sistem demokrasi memang sistem Dajjal? Tentu jawabannya tidak.

Menyematkan istilah Dajjal pada sistem demokrasi merupakan sebuah kesimpulan yang dibangun tanpa nalar yang sehat. Kita memang sepakat dari sisi kelahiran dan namanya demokrasi bukanlah sistem Islam. Ia merupakan mazhab politik dan filsafat yang lahir di Yunani Kuno, tepatnya di negara-negara Athuna. Namun nilai-nilai demokrasi, yaitu musyawarah, keadilan, persamaan, dan kebebasan berpendapat, semuanya terkonfirmasi oleh agama Islam yang mengharuskan umatnya bersifat inklusif, adil, dan menghargai perbedaan.[]

ISLAM DAN NASIONALISME

Potret Nasionalisme dalam Kehidupan Rasulullah dan Sahabatnya

Tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini ialah lemahnya semangat kebangsaan (nasionalisme) yang dialami sebagian generasi muda. Amin Abdullah menyatakan bahwa semangat nasionalisme dapat menjadi salah satu unsur majunya suatu bangsa. Pasalnya, bangsa yang maju adalah bangsa yang antar masyarakatnya bersatupadu mencapai cita-cita dan tujuan negaranya.

Lemahnya semangat nasionalisme bangsa Indonesia bermula dengan adanya klaim sementara orang yang menyatakan bahwa nasionalisme bertentangan dengan Islam. Islam agama yang mengajarkan persatuan global, sementara nasionalisme hanya mengajarkan persatuan teritorial wilayah tertentu. Nasionalisme juga dianggap identik dengan sifat *chauvinistic*, sikap sombong yang dimiliki setiap bangsa yang menganut nasionalisme kepada bangsa-bangsa yang lain.

Nasionalisme dalam Islam berbeda dengan nasionalisme yang diklaim sebagian kelompok dengan menganggapnya bertentangan dengan Islam dan adanya unsur *chauvinistic*. Melalui ayat Al-Qur'an QS. Al-Hujurat [13]: 49 Allah SWT berfirman yang artinya:

> *Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan berduka-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di*

antara kamu. Sesungguhnya Allah Mengetahui lagi Maha Mengenal.

Menurut Al-Badhawi, ayat di atas memberi isyarat bahwa diciptakannya manusia berbangsa-bangsa bukan untuk saling menyombongkan diri. Karena sejatinya, orang yang mulia di sisi Allah bukan lain kecuali mereka yang paling bertakwa kepada-Nya. Diciptakannya manusia berbangsa-bangsa agar saling mengenal dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT.

Potret nasionalisme sebenarnya sudah lama dipraktikan secara sempurna oleh Nabi Muhammad SAW. Sewaktu beliau hendak hijrah ke Madinah karena perilaku jahat kekerasan orang-orang kafir di Mekah, Rasulullah SAW bersabda sambil meneteskan air mata, *Demi Allah wahai Mekah, sungguh engkau adalah bumi Allah yang paling baik. Seandainya orang-orang kafir tidak mengusirku, sungguh aku tidak akan pernah keluar darimu*.

Dalam pada itu Rasulullah SAW sampai-sampai bersumpah atas nama negerinya, yaitu negeri Mekah. Kecintaannya kepada negeri Mekah sangat kuat, sampai-sampai beliau tidak rela dan berat hati meninggalkan tanah kelahirannya. Bagi Nabi, mencintai negeri Mekah adalah sesuatu yang tidak bisa dihilangkan dari lubuk hati. Fakta ini menunjukan betapa Rasulullah SAW memiliki jiwa menicintai negeri (nasionalisme) yang cukup kuat.

Rasulullah meninggalkan Mekah juga dengan tujuan berdakwah di Madinah. Meski rasa berat untuk meninggalkan Mekah, beliau harus berpindah ke Madinah guna penyebaran agama Islam. Sesampainya di Madinah, Rasulullah SAW dan para sahabatnya menemukan negeri yang berbeda dengan Mekah.

Di sana didapati banyak keragaman, dari mulai keragaman agama, suku, ras bahkan budaya.

Tidak lama ketika berada di Madinah, Rasulullah SAW dan para sahabatnya berdoa kepada Allah SWT agar dirinya dan sahabat-sahabatnya diberikan rasa cinta kepada Madinah sebagaimana mereka memiliki rasa cinta yang sangat dalam kepada negeri Mekah. Rasulullah dan para sahabatnya ingin memajukan dan memakmurkan Madinah sebagai tanda cinta kepadanya.

Potret kecintaan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya kepada suatu negeri - Mekah ataupun Madinah - terekam dengan apik dalam sejarah Islam. Sikap memiliki semangat nasionalisme sudah dipraktikkan oleh sang Baginda Rasulullah SAW. Sikap nasionalisme nabi dan para sahabatnya ialah dalam rangka memajukan negara, bukan untuk saling menyombongkan diri. Islam melalui Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya memberikan pelajaran penting terkait urgensi nasionalisme di tubuh bangsa. Sehingga sikap nasionalisme wajib dimiliki siapapun untuk mengangkat derajat agama dan bangsanya.[]

Akhlak dalam Berbangsa

Manusia diciptakan oleh Allah SWT ke muka bumi dalam bentuk bangsa-bangsa dan kabilah. Sebagaimana tercatat dalam QS. Al-Hujurat [49]: 13. Bukan tanpa alasan, diciptakannya dalam bentuk demikian itu agar satu sama lain saling mengenal. Pada redaksi akhir ayat tersebut ditegaskan, bahwa hamba Allah yang paling mulia di muka bumi adalah mereka yang paling bertakwa (*inna akramakum indallahi atqakum*).

Perjalanan manusia hidup di muka bumi tidak lepas dari kelalaian dan keluputan. Kedua sifat ini adalah manusiawi selagi masih dalam batas kewajaran dan manusia masih mau untuk diingatkan. Yang dilarang agama adalah manakala kelalaian itu sampai menjerumuskannya untuk menolak kodratnya diciptakan Allah SWT, termasuk kodrat diciptakannya dalam bentuk berbangsa-bangsa. Kelalalain tidak wajar ini manakala seseorang menginginkan agar kodrat berbangsa-bangsa diganti dengan persatuan manusia seluruh dunia di bawah satu sistem (*khilafah*).

Untuk tetap berada dalam kodrat Allah SWT, agama Islam memberikan panduan dalam berbangsa dan bernegara. Panduan yang dimaksud adalah akhlak dan moral yang harus dimiliki oleh seseorang yang hidup dalam suatu negara. Sebab nihilnya akhlak dalam berbangsa, selain melanggar kodrat Allah, juga hanya akan menimbulkan kekacauan di muka bumi. Manusia yang hidup dalam suatu negara harus memegang prinsip-prinsip akhlak agar Allah ridha dan menjadikan negaranya sebagai negeri yang baik yang penuh dengan ampunan Allah (*baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur*).

Dalam suatu bangsa dan negara sudah pasti adanya seorang pemimpin. Keberadaannya merupakan keharusan yang

meski ditegakkan. Karena tanpa pemimpin suatu bangsa hanya akan melahirkan perpecahan antar masyarakatnya. Salah satu akhlak yang harus dimiliki seorang pemimpin dalam berbangsa adalah adil. Ya, adil dalam menentukan kebijakan agar tidak ada satupun masyarakat yang merasakan ketidakadilan dalam hal apapun. Termasuk sifat adil seorang pemimpin dalam berbangsa dan bernegara adalah membuat sistem dan ideologi yang mampu memayungi seluruh manusia dari berbagai latar belakang perbedaan suku, etnik, ras, dan agamanya.

Akhlak yang perlu dimiliki bagi seorang pemimpin dalam konteks berbangsa juga telah dicontohkan dalam pribadi Nabi Muhammad SAW yang memiliki empat sifat, *yaitu shidiq, amanah, tabligh dan fathanah. Shidiq* dalam konteks berbangsa adalah lurus dan dapat dipercaya atas kebijakan yang diterapkannya. Sementara *amanah* maksudnya adalah seorang pemimpin harus memiliki akhlak bertanggu jawab dalam mengemban dan menjelaskan tugasnya. Sedangkan *tabligh* maksudnya adalah kemampuan dalam menyampaikan kebenaran. Dan *fathananh* ialah cerdas dalam menyampaikan sesuatu kepada rakyatnya, sehingga dapat diikuti oleh rakyatnya.

Bagi rakyat, akhlak yang perlu dijalankan dalam berbangsa adalah taat kepada pemerintah. Imam An-Nawawi dalam *al-Futuhat al-Madaniyah fis Syu'ab al-Imaniyah* menegaskan bahwa setiap manusia harus taat kepada pemimpinnya, meskipun ia adalah seorang budak hitam, selama apa yang diperintahnya adalah kebaikan dan tidak bertentangan dengan syariat. Pemimpin menjadi kewajiban untuk diikuti karena keputusannya akan menentukan masa depan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Akhlak yang juga perlu dimiliki rakyat dalam berbangsa dan bernegara adalah menjunjung tinggi nama negara di manapun ia berada. Sebaliknya, tidak dibenarkan merendahkan negara dan atau simbol-simbolnya. Akhlak ini penting sebagai upaya memuliakan dan menjaga nama baik negara di mata dunia. Karena kemuliaan sebuah umat juga akan tercermin manakala negaranya juga mulia di mata negara-negara lain. Bahkan, akhlak ini sudah diterapkan oleh Nabi Muhammad SWT ketika membanggakan kota Mekah ketika beliau hendak hijrah ke Madinah.

Secara khusus dalam konteks Indonesia, akhlak yang harus dimiliki rakyatnya adalah menghayati nilai-nilai Pancasila, menerima Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan taat pada UUD 1945. Menghayati, menerima dan taat kepada atribut-atribur negara merupakan bentuk ketaatan kepada pemimpin. Dan ketaatan kepada pemimpin merupakan taat kepada Allah SWT. Selain itu juga karena atribut-atribur tersebut sejalan dengan nilai-nilai agama, yang mengajarkan nilai persatuan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah dan keadilan.

Akhlak merupakan perangai yang penting dimiliki seseorang dalam kehidupan berbangsa. Tanpa akhlak, tidak ada bedanya antara manusia dan binatang. Dalam konteks berbangsa dan bernegara, akhlak menjadi nilai penting karena dapat menjaga solidaritas dalam membangun bangsa dan negara. Akhlak menjadi modal besar bagi keutuhan dan kemajuan suatu bangsa. Selain itu, akhlak menjadi poin penting agar suatu bangsa dan negara dapat mencapai predikat *baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur*.[]

Gagal Paham Memahami Nasionalisme

Setiap manusia yang hidup di suatu negara pasti memiliki cita-cita luhur dan ingin berprestasi demi bangsanya. Mereka siap mengorbankan jiwa dan raganya dalam rangka memajukan dan memakmurkan negaranya. Luthfi As-Sibaghi menegaskan dengan semangat nasionalisme setiap orang akan berjuang mengangkat martabat negara dan bangsanya.

Nasionalisme merupakan keyakinan yang dimiliki seseorang yang hidup di suatu negara yang mana ia menginginkan agar negara dan bangsanya lebih maju dibandingkan dengan negara dan bangsa yang lain. Konsep ini ditentang keras oleh para pengasong *khilafah* karena alasan nasionalisme telah memecah belah umat Islam dalam bentuk negara bangsa. Nasionalisme juga ditentang mereka karena diklaim bertentangan dengan Islam yang mengharuskan persatuan tanpa batas.

Alasan-alasan penolakan nasionalisme para pegiat *khilafah* ini betapapun tidak masuk akal. Sebab, perbedaan teritorial orang-orang Islam di negara-negara yang berbeda tidak bisa disimpulkan begitu saja bahwa akan memecah belah mereka. Al-Baidhawi menyatakan, Al-Quran sebagai sumber keagamaan umat Islam telah mengajarkan perbedaan sekaligus juga mangajaknya berlomba-lomba dalam kebaikan. Keduanya merupakan esensi dari nasionalisme. Itu artinya, nasionalisme tidak akan memecah persatuan umat Islam di seluruh dunia hanya karena perbedaan negara yang ditempati. Dengan jiwa persatuan yang kuat yang dimiliki orang Islam, satu sama lain tetap dapat bersatu dan solid untuk mengangkat derajat agama, walaupun berbeda-beda bangsa dan negara.

Menolak nasionalisme merupakan tindakan yang berbahaya, bahkan bertentangan dengan Islam. Amin Abdullah menyebutkan bahaya-bahaya yang bisa lahir atas penolakan terhadap nasionalisme, pertama yaitu melemahnya semangat kebangsaan. Menolak nasionalisme membuat seseorang apatis terhadap masa depan bangsanya. Padahal, Nabi Muhammad sendiri merupakan Nasionalis sejati, beliau sangat mencintai negeri dimana beliau dilahirkan, yaitu Mekah.

Dalam ayat Al-Quran disebutkan bahwa manusia sudah dikodratkan untuk hidup berbangsa-bangsa, yaitu dalam QS. Al-Hujurat (49): 13. Al-Alusi menegaskan ayat tersebut sebagai bukti konkrit manusia telah diciptakan oleh Allah SWT dari bapak dan ibu yang sama, yaitu Adam dan Hawa, dan kemudian menjadi berkelompok, berbangsa-bangsa. Sehingga tidak layak jika suatu bangsa bersikap sombong dan menyulut perpecahan dengan bangsa yang lain.

Sikap nasionalisme merupakan kodrat Allah SWT. Menolak nasionalisme berarti menolak ketentuan-Nya bahwa manusia diciptakan dalam bentuk bangsa-bangsa. Tujuan utama diciptakannya manusia berbangsa ialah agar saling berlomba dalam kebaikan. Memantapkan sikap nasionalisme berarti mengaplikasikan ketentuan Allah SWT yang telah menciptakan umat manusia dalam bentuk bangsa-bangsa.

Bahaya menolak nasionalisme yang lain membuat seseorang cenderung berfaham keagamaan yang sempit dan eksklusif. Menentang nasionalisme berarti menolak konsep universal Islam sebagai agama persatuan yang dijunjung untuk segala segmen kehidupan. Karena persatuan dalam Islam melewati skat kebangsaan. Bentuk negara bangsa dan persatuan umat Islam bukanlah dua hal yang bertentangan. Keduanya

berkelindan pada diri seorang muslim, untuk memajukan persatuan Islam sekaligus kemajuan negara tempatnya lahir.

Menolak nasionalisme juga cenderung menghantarkan seseorang kepada pemahaman agama yang formalistik. Sikap ini mementingkan simbol kesatuan dari sisi teritorial wilayah suatu bangsa, bukan pada persatuan yang terpatri pada jiwa raga setiap muslim di dunia. Islam merupakan agama yang universal, yang selalu mengutamakan esensi ajaran-ajarannya, bukan mendahulukan simbol-simbol semata.

Faham nasionalisme harus dimiliki setiap orang Islam. Islam tidak menentang nasionalisme, karena manusia telah dikodratkan hidup berbangsa-bangsa. Nasionalisme dan persatuan umat bukan dua hal yang bertentangan, keduanya bisa saling terpaut satu sama lain. Menolak nasionalisme cenderung melemahkan wawasan kebangsaan, sehingga sulit untuk memberikan kontribusi kebaikan bagi bangsa. Menolak nasionalisme hanya akan membuat seseorang berfikir eksklusif dan rigid, sikap ini hanya akan merugikan agama, karena agama dipandang hanya dari formalistiknya belaka, bukan pada nilai-nilai universalnya.[]

Haruskah Mencintai Tanah Air?

Setiap manusia mencintai tempat kelahiran dan Tanah Airnya. Ernest Renan menyebut bukan saja rasa cinta yang dimiliki setiap orang kepada Tanah Airnya, tetapi juga keinginan kuat untuk membangun kemajuan negara dan bangsanya dalam segala bidang.

Meskipun demikian, sikap cinta kepada Tanah Air masih ditentang oleh sebagian orang. Tohir Bawazir menyebut sikap ini ditentang dengan alasan berlawanan dengan Islam, karena Islam mengajarkan persatuan umat tanpa dibatasi teritorial wilayah tertentu, sedangkan cinta Tanah Air mengajarkan sikap cinta dibatasi hanya pada sebuah bangsa dan negara dalam konsep negara bangsa (*nation state*).

Mencintai Tanah Air juga dinilai tidak sejalan dengan syariat Islam. Cinta pada Tanah Air dan Islam diklaim sebagai dua hal yang bertentangan secara substansif. Sebab, Islam mengajarkan nilai-nilai persatuan umat secara universal, sedangkan cinta Tanah Air hanya mempresentasikannya nilai-nilai persatuan yang partikular.

Alasan penolakan berikutnya karena sikap ini dianggap sebagai sikap yang tumbuh kembang dari dunia Barat, yang tidak semeskinya diyakini, apalagi dipraktikkan oleh umat Islam. Sikap anti terhadap pemikiran Barat dan mempertentangkannya dengan Islam menjadi landasan keengganan sementara orang memiliki rasa cinta kepada tanah Air.

Fred Helliday menyebut penolakan terhadap sikap rasa cinta kepada Tanah Air yang merupakan anak kandung Barat berdampak pada alasan berikutnya, yaitu klaim bahwa sikap cinta Tanah Air identik dengan sifat *chauvinistic*, sikap egois pada diri

seseorang yang mengagungkan bangsanya sendiri dan merendahkan bangsa-bangsa di luar bangsanya sendiri.

Alasan penolakan pada sikap cinta Tanah Air atas dasar berlawanan dengan konsep persatuan dalam Islam dibantah oleh Muhammad Iqbal, cendekiawan muslim asal Pakistan. Menurutnya, perbedaan teritorial dalam konsep nasionalisme tidak berarti hendak memecah persatuan umat. Justru diciptakannya umat berbangsa-bangsa agar mereka saling berkompetisi dalam kebaikan dan supaya saling mengenal (QS. Al-Hujurat: 13) serta menyempurnakan eksistensi mereka satu sama lain.

Sikap cinta kepada Tanah Air tidak dapat dijustifikasi akan memecah umat Islam, karena justru dengan sikap ini setiap pribadi seseorang dalam sebuah negara memiliki jiwa yang kuat, semangat dan cita-cita luhur agar bangsanya terus bertumbuh kembang dalam kebaikan. Al-Quran sendiri memberi isyarat agar umat manusia membuat kesejahteraan bagi bangsanyanya, sehingga mereka pandai menjadi bangsa yang bersyukur kepada Allah (QS. Al-A'raf: 58).

Dari keterangan di atas dipahami bahwa sikap cinta kepada Tanah Air tidak bertentangan dengan Islam. Sikap cinta kepada tanah Air penting dimiliki setiap bangsa guna meningkatkan kualitas diri seseorang dan bangsanya dengan sikap dan tindakan-tindakan yang positif.

Sebaliknya, menolak sikap cinta Tanah Air karena alasan mengikuti pemahaman Barat yang identik dengan sikap *chauvinistic* tidak sama sekali relevan. Karena sejarah lahirnya cinta Tanah Air antarnegara berbeda satu dengan lainnya. Sikap cinta Tanah Air negara-negara Barat pada umumnya berkembang atas dasar membanggakan bangsanya sendiri dan merendahkan

bangsa lain (*chauvinisme*). Sementara menurut Muhammad Yamin, lahirnya sikap cinta Tanah Air bangsa Indonesia karena semangat melawan penjajahan. Artinya, konstruksi sikap cinta Tanah Air bangsa Indonesia bukan untuk melahirkan bangsa yang sombong dan memiliki keinginan menjajah bangsa lain, akan tetapi menumbuh-kembangkan semangat kebangsaan, lepas dari penjajahan, dan terciptanya masyarakat yang mendahulukan kemanusiaan.

Kiranya dasar cinta Tanah Air bangsa Indonesia yang dilandasi semangat kebangsaa selaras dengan apa yang dinyatakan Al-Baidhawi ketika menafsirkan Qs. Al-Hujurat: 13. Menurutnya, diciptakannya manusia dalam bentuk bangsa-bangsa bukan untuk menyombongkan asal keturunannya, tetapi agar mereka satu sama lain saling mengenal dan meningkatkan kualitas jati dirinya. Sikap nasionalis demikian akan mendekatkan seseorang kepada ketakwaan pada Allah SWT.[]

Mengapa Harus Mencintai Tanah Air

Mencintai Tanah Air berarti mengekspresikan emosi positif yang kuat untuk negeri yang dihuni seseorang. Istilah Tanah Air dalam konteks keindonesiaan ialah seluruh bagian bumi Indonesia yang terdiri dari daratan dan lautan. Pendefinisian ini mengarah kepada teritorial sebuah tempat, yaitu tempat yang berada di Indonesia sebagai tempat lahirnya seluruh bangsa Indonesia.

Secara esensial Tanah Air yang dimaksud pada istilah 'cinta Tanah Air' bisa digunakan pada tempat-tempat lain seluruh negeri di dunia. Mekah misalnya, menjadi Tanah Air Nabi Muhammad, sebuah tempat kelahiran manusia suci itu. Begitupun negeri-negeri lainnya di seluruh dunia.

Diakui atau tidak setiap orang memiliki rasa cinta pada tempat kelahirannya, termasuk orang-orang Islam. Rasulullah sebagai teladan umat manusia pun memiliki sikap ini. Suatu hari saat hendak hijrah dari Mekah ke Madinah, setelah orang-orang kafir Quraisy menyakiti dan mengusirnya, beliau SAW bersumpah - dibarengi rasa sedih - dengan mengatakan, "*Sungguh engkau (Mekah) adalah bumi Allah terbaik. Andai saja orang-orang kafir tidak mengeluarkanku, pastilah aku tidak akan meninggalkanmu*".

Dalam persoalan ibadah, sikap cinta pada Tanah Air juga amat penting. Mengapa, karena orang yang menginginkan ibadahnya khusyu maka harus memastikan terlebih dahulu bahwa tempatnya (baca: Tanah Airnya) aman dari gangguan apapun. Jaminan keamanan itu dapat diwujudkan jika setiap orang berkomitmen menjaga dan mencintai tempat yang dijadikannya tempat untuk beribadah.

Bentuk-bentuk jaminan keamanan bagi Tanah Air, agar ibadah seseorang menjadi khusyu bisa berupa banyak hal, baik keamanan dari gangguan negara lain, keamanan ekonomi, politik, pendidikan dan lain sebagainya. Setiap warga bangsa harus berperan untuk memastikan jaminan keamanan Tanah Air itu terwujud dengan baik, sesuai kadar kemampuan dan kesanggupan masing-masing.

Cinta Tanah Air menjadi penting sebagai jalan menuju kesempurnaan ibadah. Kesempurnaan ibadah salah satu dasarnya tergantung sejauh mana kesempurnaan keamanan suatu negeri. Al-Buruswi menegaskan cinta kepada Tanah Air harus dimiliki setiap orang Islam. Karena tanpa dasar cinta kepadanya, keamanan suatu negeri sulit dicapai. Jika sulit mendapatkan jaminan keamanan, niscaya sulit pula orang Islam untuk beribadah secara khusyu.

Cinta Tanah Air tidak sama sekali bertentangan dengan Islam. Sebaliknya, cinta Tanah Air menjadi bagian integral dengan Islam yang bisa memastikan pemeluknya beribadah secara sempurna. Hadratusyaikh KH Hasyim Asyari dalam perkataan masyhurnya mengatakan, "*Hubbul wathan minal iman*: cinta tanah Air bagian dari iman". Ini menjadi bukti bahwa cinta Tanah Air dan Islam adalah satu kesatuan yang tak bisa dipisahkan.

Sikap cinta kepada Tanah Air juga bukan perbuatan musyrik, karena tidak dimaksudkan menuhankan Tanah Air. Tuhan satu-satunya bagi orang yang mencintai Tanah Airnya hanyalah Allah SWT, dan tanah Air menjadi jalan untuknya agar menjadi lebih dekat dengan-Nya melalui kekhusyuan ibadah, melalui keamanan dan ketentraman Tanah Airnya.

Semangat cinta Tanah Air bukan untuk memisahkan kesatuan dan persatuan orang-orang Islam di dunia dalam bentuk negara bangsa (*nation state*). Watak orang mukmin, dalam kondisi apapun, ialah ingin bersatu dan bersaudara, sebagaimana ditegaskan pada QS. Al: Hujurat (49): 10. Sebaliknya, cinta Tanah Air bagi setiap muslim dapat menjadi ajang untuk berkompetisi dalam hal kebaikan (*fastabiqul khairaat*), tanpa ada unsur kebencian satu dengan yang lain.

Akhirnya, hakikat cinta Tanah Air sudah dipraktikan oleh Nabi Muhammad sejak beliau SAW diutus menjadi rasul. Sikap cinta kepada Tanah Air yang diwujudkan dalam hal-hal positif untuk keamanan suatu negeri juga bisa menjadi jalan kesempurnaan ibadah. Tidak ada alasan bagi setiap muslim untuk memiliki jiwa mencintai Tanah Airnya. Kerana mencintai Tanah Air merupakan bagian dari keberislaman yang sempurna.[]

Islam dan Nasionalisme; Dua Saudara Kembar yang Tak Bisa Dipisahkan

Sejarah mencatat sistem *khilafah* sudah tidak dibutuhkan lagi oleh umat manusia sejak runtuhnya sistem tersebut pada tahun 1924 M. Umat manusia di dunia segera membentuk negara bangsa (*nation state*) guna memajukan peradaban wilayahnya masing-masing.

Para penyeru *khilafah* mengklaim bahwa tumbangnya sistem *khilafah* bukan karena sistemnya yang bermasalah, namun dikarenakan bobroknya akhlak dan pribadi Kemal Attaturk, pemimpin pada masa Dinasti Utsmani yang menginginkan terwujudnya negara sekuler. Para penyeru *khilafah* malu-malu untuk menyatakan bahwa sebenarnya sistem *khilafah*-lah yang bermasalah, yang menjadi penyebab lahirnya pemimpin otoriter, saling serang satu dengan yang lain, dan tidak dapat memberikan solusi terhadap kezaliman pemimpin salah satunya seperti Kemal Attaturk.

Soal tumbangnya sistem ini, para penyeru *khilafah* selalu mengklaim yang salah ialah pemimpinnya, tidak menengok bagaimana sistem *khilafah* juga sebetulnya juga sarat dengan problem. Tetapi di saat Indonesia memiliki problem negara, seperti korupsi, harga BBM naik, bencana, dan lain semisalnya, para penyeru *khilafah* justru menyalahkan sistem Demokrasi, bukan orang-orang yang di dalamnya. Para penyeru *khilafah* membenci demokrasi dan nasionalisme yang diklaim telah melahirkan problem-problem besar yang sampai detik ini masih dihadapi bangsa Indonesia. Mereka tidak mempersoalkan pemimpin yang korup dan bobrok serta bagaimana memberikan

solusi konkrit agar bangsa ini lepas dari problem yang dihadapinya.

Nasionalisme atau mencintai bangsa merupakan sebuah keniscayaan. Quraish Shihab menegaskan, asal kejadian manusia itu berasal dari tanah. Sebagaimana ditegaskan QS. Âli Imrân [3]: 59. Kesadaran bahwa manusia berasal dari tanah memberi pesan yang mendalam bahwa umat Islam harus mencintai Tanah Airnya. Ia mesti mengagungkan tanah kelahirannya, karena tanah kelahiran telah memberikan banyak hal positif, dan kita pun secara tidak sadar mencintainya. Al-Buruswi juga menegaskan bahwa mencintai Tanah Air merupakan bagian dari komitmen keimanan. Kesadaran akan ini juga menegasikan bahwa manusia berasal dari api sebagaimana Iblis. Sebab api bersifat membakar, panas, dan bergejolak, maka umat Islam pun tidak mudah bergejolak dengan nasionalisme yang mungkin di masa nabi belum waktunya digunakan dan faktanya relevan diterapkan di masa sekarang.

Para perindu *khilafah* juga mengklaim nasionalisme hanya menumbuhkan sikap kebencian satu umat dengan umat yang lain. Berbeda dengan *khilafah* yang diklaim selalu bisa membingkai persatuan Islam seluruh dunia. Klaim ini digaungkan di berbagai kesempatan namun tidak pernah konkrit dalam praktiknya.

Imam Az-Zuhri, suatu hari pernah ditanya soal fanatisme yang dilarang dalam Islam. Beliau menjawab: yang dilarang adalah fanatisme yang berujung pada kebencian kepada orang lain. Cinta Tanah Air dan nasionalisme yang tidak sampai membenci bangsa, kelompok, dan negara lain, Islam tidak melarangnya. Ini sejalan dengan hadis Nabi yang berbunyi, "*Belalah saudaramu yang menganiaya dan yang teraniaya*."

Salah seorang sahabat bertanya, "*Wajar jika kami membela yang teraniaya. Tapi bagaimana dengan yang menganiaya*?" Rasulullah menjawab, "*Membelanya dengan menghalanginya melakukan penganiayaan*." (HR. Bukhari).

Karena pentingnya sikap cinta kepada Tanah Air dan nasionalisme, sampai-sampai Rasulullah SAW ketika hendak hijrah meninggalkan kota Mekah beliau menangis seraya berkata, "*innaki la khairu ardhillah. Walaula anni ukhrijtu minki ma kharajtu minki*; sungguh Mekah engkau adalah bumi paling baik di sisi Allah. Seandainya aku tidak dikeluarkan (oleh orang-orang musyrik) darimu, maka aku tidak akan pergi meninggalkanmu."

Peristiwa hijrah Nabi Muhammad menuju kota Yatsrib/Madinah ini memberi pesan bahwa nasionalisme sudah jauh-jauh hari dipraktikan secara nyata oleh Nabi agung Muhammad SAW. Tidak hanya di Mekah, ketika para sahabat Nabi di kota Madinah, mereka juga selalu berdoa agar selalu diberikan kecintaan kepada Madinah sebagaimana mereka mencintai Mekah. Mereka berdoa, "*Allahumma habbib ilainâ al-Madînah kama habbabta ilaina al-Makkah*; Ya Allah berikan kami kecintaan kepada Madinah sebagaimana Engkau memberikan rasa cinta kepada kami terhadap Mekah."

Pernyataan bahwa nasionalisme bertentangan dengan Islam merupakan pernyataan yang mengada-ada. Islam melalui Al-Qur'an dan Hadis Nabi sudah jauh-jauh menjadikan cinta Tanah Air dan nasionalisme sebagai mitra saudara yang tidak bisa dipisahkan. Islam dan nasionalisme bagaikan dua keping mata uang yang jika dipisah salah satunya maka tidak memiliki nilai apapun. Ketiadaan sikap nasionalis berpotensi membuat seseorang tidak memiliki rasa cinta pada Tanah Air sehingga enggan mau berjuang bagi bangsanya, atau tidak memiliki

semangat berislam sehingga nilai persatuannya bersifat *chauvinistic* (menganggap rendah bangsa dan kelompok lain). Hasan Al-Banna memberikan dukungan bahwa konsep nasionalisme seharusnya tidak bertentangan dengan hadis nabi yang menyatakan bahwa semua orang Islam bersaudara di mana pun. Inilah konsep nasionalisme bangsa Indonesia, sebagaimaan ditegaskan oleh Bung Karno, yaitu rasa semangat kebangsaan, tanpa membenci bangsa-bangsa lain.

KH Said Aqil Siraj memberi penguatan kepada konsep nasionalisme dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai negara yang dihuni oleh beragam pemeluk agama. Menurut Ketua Umum PBNU (2010-2021) ini nasionalisme dan Islam merupakan dua hal yang tak dapat dipisahkan. Umat Islam harus memiliki jiwa nasionalis. Dan seorang nasionalis harus berjiwa Islam. Muslim yang tidak memiliki jiwa nasionalisme hanya akan mementingkan agamanya, tidak peduli pada kehancuran negerinya, sebagaimana itu terjadi di berbagai negara Timur Tengah, seperti Suriah, Afghanistan dan Irak. Meski ada banyak ulama-ulama alim dalam keilmuan agama, namun di negara-negara tersebut ulamanya tak dapat membendung pertikaian di negerinya. Sebaliknya, nasionalis yang tidak memiliki jiwa Islam hanya akan melahirkan sikap nasionalis yang kering, bahkan lepas dari nilai-nilai kemanusiaan.[]

Meneguhkan Kembali Prinsip Kebangsaan sebagai Penangkal Radikalisme

Lahirnya faham radikalisme berawal dari adanya tindakan sekelompok orang yang mengaku Islam namun berlebihan dalam beragama. Sikap demikian kerapkali ditujukan sebagai kritik terhadap hukum positif di suatu negara dengan mengklaim sebagai hukum yang bertentangan dengan hukum syariat. Walter Reich menegaskan bahwa radikalisme adalah upaya pemaksaan ideologi yang berujung pada tindakan terorisme yang dirancang untuk meningkatkan hasil-hasil yang diinginkan secara ekstrim, dengan cara menakut-nakuti menggunakan ideologi agama.

Semua agama sepakat bahwa tindakan radikalisme bertentangan dengan ajaran-ajarannya, sebab sikap demikian hanya akan berujung pada tindakan kekerasan yang mengatasnamakan agama. Agama dimanipulasi hanya untuk memenuhi kemauan sesaat kelompok radikal dan teror sehingga di tangan mereka posisinya menjadi agama murahan dan seringkali dituduh sebagai agama kekerasan.

Upaya untuk menyingkirkan radikalisme dan terorisme telah dilakukan berbagai pihak, dari mulai lembaga-lembaga pemerintahan hingga pihak swasta. Kegiatan tersebut melibatkan berbagai pihak, institusi atau lembaga yang konsen pada bidang penanganan radikalisme dan terorisme. Namun sejatinya, Indonesia memiliki prinsip-prinsip dasar yang dapat menjadi tawaran untuk menangkal faham radikal yang akan berujung pada tindakan teror ini. Negara dari sisi perangkatnya, sebenarnya telah memiliki panduan-panduan yang kuat untuk bebas dari tindakan radikal dan tindakan teror yang terus menjadi ancaman bangsa dalam kondisi dan situasi apapun.

Pertama, menjadikan Pancasila sebagai landasan ideologi yang ideal. Prinsip ini amat penting menjadi landasan agar masyarakat Indonesia bebas dari tindakan radikal dan ekstrem. Pancasila merupakan falsafah hidup, cita-cita moral, dan ideologi bagi bangsa Indonesia. Pancasila mampu menyaring berbagai ideologi asing yang masuk dalam wilayah bangsa Indonesia. Sebagai konsekuensi dari masyarakat yang beragam, Pancasila bisa menerima berbagai golongan jika memang memiliki tujuan yang sama dalam rangka mewujudkan kemajuan bangsa Indonesia. Namun jika terdapat ideologi yang justru bertentangan dengan semangat Pancasila dan semangat keberagaman bangsa maka harus ditolak, seperti ideologi *khilafah* yang jelas-jelas bertentangan dengan Pancasila dan dengan keragaman bangsa Indonesia.

Prinsip *kedua*, menaati UUD sebagai konstitusi negara bangsa Indonesia. Cara sederhana agar radikalisme dan terorisme hengkang dari negeri ini adalah dengan meyakini dan mempraktikan secara maksimal isi undangan-undang. Sebagaimana disebut dalam pembukaan UUD 1945 bahwa Indonesia adalah negara yang berdaulat, bersatu, adil, dan makmur. Dengan konstitusi ini masyarakat Indonesia juga meyakini adanya Hak Asasi Manusia (HAM) yang menuntut seluruh warga bangsa menghargai keyakinan dan pemahaman orang lain yang berbeda sebagai suatu hak mereka. Meneladani prinsip-prinsip dalam UUD 1945 dapat menjadi salah satu jalan untuk memutus mata rantai lajur radikalisme dan terorisme. Sebaliknya, jika konstitusi negara hanya menjadi nama semata dan tidak digunakan secara benar, maka radikalisme dan

terorisme akan terus menghantui kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.

Prinsip *ketiga*, yaitu menjadikan wawasan nusantara sebagai visional. Prinsip ini adalah cara pandang dimana kita menjadikan diri dan lingkungan/wilayah dalam mencapai cita-cita bersama. Konsepsi ini menjadikan masa lalu sebagai pelajaran untuk melangkah menuju masa depan bangsa yang gemilang dan sejahtera. Makna wawasan nusantara juga dapat dimaknai sebagai wawasan inklusif karena ulama-ulama nusantara dalam menyebarkan pemahaman Islam ke masyarakat juga dengan cara-cara santun, terbuka, dan inklusif. Wawasan ini membuka pikiran bahwa hidup di Indonesia harus siap berdampingan satu sama lain, siap mengalami perubahan yang visionar meski bertolak dengan kebiasaan lama, dan siap untuk mencapai cita-cita masyarakat yang adil dan sejahtera.

Prinsip lain yang dapat menjadi penangkal radikalisme dan terorisme adalah memperkuat ketahanan nasional. Implementasi ketahanan nasional dalam menanggulangi radikalisme dapat direpresentasikan baik dalam ideologi, pemikiran, wawasan, gagasan, paradigma, dan filsafat, yang semuanya didasari pada ketahanan dalam melawan gerakan-gerakan yang akan mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara di bawa payung Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dan prinsip yang tidak kalah penting adalah menjalin kerjasama dengan negara-negara Asean untuk membahas isu-isu pertahanan dalam menangkal faham radika yang sering kali lahir dijembatani dari entitas-entitas di luar negara sendiri. Negara-negara Asean memiliki peran penting dalam membendung lajur ekosistem radikalisme di berbagai negara dengan jejaring yang sudah mengakar di berbagai wilayah negara.

Maka idealnya tugas dan peran anak-anak bangsa hari ini tidak hanya mengkampanyekan faham moderasi dalam beragama, prinsip-prinsip kebangsaan di atas juga penting untuk kembali diteguhkan sebagai upaya membendung lajur radikalisme dan terorisme. Dengan begitu, sikap damai dan menghargai satu sama lain akan dimiliki oleh individu, keluarga, kelompok, masyarakat, penyelengara negara, untuk kemudian membendung tumbuhnya gerakan-gerakan radikal. Ditambah dengan menghidupkan kegiatan-kegiatan yang didasari prinsip-prinsip di atas yang dijalankan dengan sistematis, sinergis dan berkelanjutan, akan menjadikan radikalisme dan terorisme berhenti lahir kembali di Indonesia.[]

Komitmen Nasionalisme Terhadap Kesadaran Keragaman Bangsa

Bangsa Indonesia terdiri dari beragam suku, bahkan agama. Indonesia di dalamnya juga didapati beragam organisasi keagamaan yang memiliki visi dan misi berbeda satu dengan yang lainnya. Sayangnya, masih ada sementara orang yang mengaku berjiwa nasionalis, negarawan, tapi enggan bisa menghargai perbedaan dan keragaman. Mereka berpidato di mana-mana menyatakan Indonesia merupakan negeri yang beragam, namun hanya surplus pada ucapan, tetapi nol dalam tindakan. Mereka mengkampanyekan jargon nasionalisme namun di satu sisi yang lain menolak kelompok yang berbeda keyakinan agama dan paham keagamaan. Alih-alih mengaku meyakini Pancasila dan UUD 1945, kenyataannya mereka mengkebiri keduanya. Tindakannya bertentangan dengan semangat berbangsa dan bernegara.

Jiwa nasionalisme sejatinya meniscayakan adanya keragaman. Sejarah membuktikan bagaimana para ulama dahulu ketika melawan penjajahan tidak memandang seseorang dari latar belakang apapun, termasuk agama. Mereka bertekad dengan bulat melawan penjajah harus dengan persatuan semua golongan. Para *founding fathers* Indonesia pun terdiri dari kelompok yang beragam, ada yang Islam, non-Islam, nasionalis, dan agamais. Mereka bersatu padu membangun semangat persatuan dalam keragaman. Para pendiri bangsa sadar bahwa jika keberagaman bisa dikelola dengan baik akan melahirkan energi positif untuk membangun dan memberdayakan bangsa.

Secara historis, Islam sejak 14 abad yang lalu telah meniscayakan seseorang yang memiliki jiwa nasionalisme

seharusnya sadar akan keragaman. Di dalam QS. Al-Hujurat ayat 13 Allah berfirman yang artinya: "*Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti.*" Dalam ayat yang lain Allah kembali menegaskan dalam QS. Al-Baqarah 213, "*Manusia itu (dahulunya) satu umat. Lalu Allah mengutus para nabi (untuk) menyampaikan kabar gembira dan peringatan. Dan diturunkan-Nya bersama mereka Kitab yang mengandung kebenaran, untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan*."

Pada QS. Al-Hujurat didapati terma "*syu'ûb*" yang menurut Imam Ibn Manzur bermakna sekelompok orang yang berada dalam suatu tempat. Quraish Shihab menegaskan makna kata tersebut sebagai sekelompok orang yang terdiri dari laki-laki dan perempuan yang menempati suatu tempat. Biasanya mereka berasal dari nenek moyang yang sama dan memiliki cita-cita yang sama. Dalam istilah modern, kata "*syu'ûb*" dapat dimaknai bangsa, sebab bangsa adalah suatu kelompok orang yang ada dalam suatu tempat. Bangsa Indonesia adalah orang-orang yang berada di negara Indonesia yang memiliki cita-cita yang sama dan berasal dari nenek moyang yang juga sama. Ayat tersebut membicarakan soal kondisi dan sikap yang dimiliki suatu bangsa.

Imam Asy-Syaukani menyatakan kandungan makna ayat di atas ialah tentang kesadaran yang harus dimiliki oleh sebuah kelompok (bangsa) bahwa Allah telah mentakdirkan manusia secara beragam, yang mana tujuannya agar saling mengenal,

bukan saling berselisih. Yang Allah nilai dari manusia adalah nilai ketakwaan, bukan kehebatan fisik atau kelompok. An-Nawawi juga memberi catatan atas ayat Al-Qur'an di atas, menurutnya, ayat di atas meniscayakan adanya suatu perbedaan dalam sebuah kelompok manusia. Semua manusia berada dalam satu keturunan yaitu Adam dan Hawa, sehingga tak selayaknya saling membuat kerusakan antar satu dengan yang lain.

Firman Allah di atas memberi isyarat kuat bahwa sebagai suatu bangsa sudah semestinya memiliki kesadaran yang kuat akan keragaman di tengan umat. Menolak adanya keragaman, baik keragaman manusia atau keragaman pemahaman agama adalah tindakan yang melawan takdir dan ketentuan Allah. Prinsip ini menjadi dasar bagi semua bangsa yang telah memilih *nation state* sebagai pijakan bermasyarakat, bahwa satu sama lain baik antarwarga bangsa atau dengan bangsa-bangsa di luar dirinya tidak boleh merasa paling hebat atau merendahkan yang lain. Setiap orang yang melabeli dirinya sebagai nasionalis meniscayakan dirinya memiliki jiwa yang sadar akan perbedaan di tengan masyarakat. Tidak boleh mencaci maki, menganggap rendah, mem-*bully* dan berseteru.

Setiap orang yang berkomitmen memilih jiwa nasionalisme menjadi niscaya jika ia sadar dan selalu mengedepankan rasa toleransi yang tinggi. Berdustalah mereka yang berkmapanye mencintai bangsa dan negara Indonesia namun masih melakukan hasutan satu sama lain atas dasar kepentingan kelompok semata. Jangan sesekali percaya kepada siapapun yang mengaku membela negara, namun kelakuannya bertentangan dengan keniscayaan pluralisme. Dalam perspektif Al-Qur'an tegas bahwa suatu kelompok atau individu yang berada dalam sebuah bangsa harus mengutamakan akhlak dan nilai

ketakwaan. Dan, nilai ketakwaan tertinggi adalah sadar akan keragaman dan memperlakukannya dengan sikap toleran.[]

Praktik Cinta Tanah Air dan Kebangsaan dalam Islam

Satu hal penting yang dapat merekatkan persatuan antar-kelompok di dalam sebuah bangsa adalah cinta Tanah Air atau memiliki semangat kebangsaan. Tanpa memiliki keduanya sulit sebuah bangsa bisa mewujudkan persatuan sebagai bangsa yang kokoh. Tidak terkecuali bagi bangsa-bangsa yang mayoritas berpenduduk muslim, cinta pada Tanah Air merupakan hal penting yang harus dijiwai oleh setiap warganya.

Agama Islam memberikan argumentasi ilmiah baik berupa teks keagamaan maupun dalam bentuk praktik kehidupan sosial terkait penegasan bahwa cinta Tanah Air bukan merupakan hal yang dilarang. Pun demikian juga tidak benar jika dikatakan bahwa konsepsi semangat kebangsaan dalam Islam lahir dari Barat yang landasan utamanya adalah perpecahan dan kebencian kepada bangsa lain.

Beberapa dalil yang menegaskan cinta Tanah Air diantaranya QS. Al-Hasyr ayat 9, Allah berfirman yang artinya: "*Dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada mereka (Muhajirin); dan mereka mengutamakan (Muhajirin), atas dirinya sendiri, meskipun mereka juga memerlukan. Dan siapa yang dijaga dirinya dari kekikiran, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung*." Selain itu dalam QS. al-Mumtahana ayat 8, Allah berfirman yang artinya: "*Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil*." Quraish Shihab menegaskan, kedua ayat di atas

merupakan bukti melekatnya cinta Tanah Air dalam Islam, yaitu didapatinya penggabungan antara iman dan negeri yang mesti diperhatikan keduanya secara seksama oleh setiap warga bangsa di dalam sebuah negara.

Praktik cinta Tanah Air diperkuat oleh teladan kebijaksanaan Nabi Muhammad SAW saat beliau tiba di kota Madinah. Beliau menghimpun semua penduduk kota tersebut walaupun satu sama lain berbeda dalam kepercayaan, agama, suku, dan asal-usul keturunan. Semua bersepakat untuk menyetujui Piagam Madinah sebagai konstitusi semua umat sembari tetap memberikan kesempatan kepada setiap pemeluk agama menjalankan kepercayaan dan agamanya masing-masing.

Piagam Madinah dibuat dalam konteks dimana masyarakat dalam kondisi damai. Lembaran-lembaran kerja itu dibuat tidak dalam kondisi konflik baik internal masyarakat Madinah ataupun eksternalnya. Artinya, Piagam Madinah yang menjadi konsensus bersama dibuat atas dasa kerelaan dan keikhlasan antarumat dengan perbedaan yang melatarbelakangi mereka. Semua masyarakat sukarela untuk menyepakati undang-undang tersebut menjadi konsensus bersama. Piagam Madinah juga dibuat saat pertama kali Nabi Muhammad hijrah di kota tersebut. Artinya, secara naluri semua penduduk Madinah sudah sejak lama menginginkan suasana perdamaian, persatuan dan kesatuan walau dalam konteks masyarakat yang berbeda-beda.

Praktik cinta Tanah Air juga nampak dalam butir-butir Piagam Madinah. Pada *muqaddimah* piagam tersebut setelah disebutkan *Basmalah* dinyatakan bahwa *'Ini adalah piagam dari Muhammad Rasulullah SAW di kalangan muslimin dan mukminin yang berasal dari Quraisy dan Yatsrib, dan yang mengikuti*

mereka, menggabungkan diri dan berjuang bersama'. Kemudian pada pasal 2 disebutkan *'Kaum Muhajirin dan Quraisy sesuai keadaan mereka bahu membahu membayar diat di antara mereka dan menebus tawanan dengan cara yang baik dan adil*'. Begitu pada pasal 16 disebutkan *'Sesungguhnya orang Yahudi yang mengikuti kita berhak atas pertolongan dan santunan sepanjang tidak terzalimi dan ditantang olehnya*'. Nilai-nilai cinta Tanah Air berupa persatuan dan pembelaan pada negeri begitu jelas dalam pasal-pasal di atas. Esensi semangat kebangsaan tersebut sebagai bentuk praktik cinta Tanah Air masyarakat Madinah antara umat Islam dengan umat-umat yang lain.

Quraish Shihab menyebut, jika dipahami esensi dari 47 pasal Piagam Madinah, meskipun Nabi Muhammad membuat piagam tersebut bersama dengan penduduk Madinah pada awal kehadirannya di Madinah, namun tidak ada satu pasal pun yang bertentangan dengan kondisi sosial dan antropologi masyarakat Madinah sebagai masyarakat yang tipologinya berbeda satu sama lain.

Selain itu, semua pasal dalam Piagam Madinah memiliki argumentasi yang kuat di dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Pasal-pasal tersebut tetap relevan hingga detik ini dalam konteks menciptakan masyarakat yang bersatu dalam perbedaan. Muhammad Imarah cendekiawan muslim Mesir menyatakan bahwa negara yang dibentuk Nabi di Madinah berhasil menyatukan berbagai etnis dan agama dengan satu kebijakan politik. Negeri terbaik tersebut dibentuk dengan konsesnsus bersama antar berbagai golongan baik suku, ras, etnik, budaya, bahkan agama.

Praktik cinta terhadap Tanah Air sudah jauh-jauh diamalkan oleh Nabi Muhammad. Ini membuktikan cinta Tanah

Air (nasionalisme) dalam dunia Islam bukan lahir dan terinspirasi oleh Barat yang dilandasi perpecahan antara Istana dan Gereja. Nasionalisme dalam Islam termaktub dalam teks agama dan langsung dipraktikan oleh Baginda Nabi Muhammad SAW. Praktik nasionalisme dalam sejarah Islam didasari prinsip persatuan yang kokoh, dengan jargon "*lahum ma lana wa alaihim ma alaina*; mereka (non-muslim) memiliki hak (dalam konteks kewarganegaraan) sebagaimana hak kita dan juga memiliki kewajiban sebagaimana kewajiban kita (umat Islam)." Sebaliknya, nasionalisme dalam Islam tidak didasari dengan sifat sombong (*chauvinistic*) dan menguasai bangsa-bangsa lain.

Sikap dan praktik cinta Tanah Air harus menjadi motivasi dan inspirasi bagi umat Islam untuk terus menumbuhkan persatuan dan kesatuan antarbangsa dengan berbagai perbedaannya. Cinta Tanah Air dalam Islam perlu terus dipupuk untuk melahirkan masyarakat yang berperadaban dan bertakwa kepada Allah SWT.[]

ISLAM DAN UNDANG-UNDANG

Indonesia; Negeri yang Amat Bersyariah

Indonesia merupakan negara yang dihuni oleh banyak keragaman, baik keragaman suku, ras, budaya, etnis, bahkan keragaman agama. Indonesia memiliki enam agama resmi yang dianut oleh masyarakatnya, yaitu agama Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Buddha, dan Konghuchu.

Islam merupakan agama yang dianut oleh mayoritas penduduk Indonesia, yaitu dianut oleh sekitar 229.62 juta jiwa. *Global Religius Future* menyebut umat Islam di Indonesia merupakan umat dengan jumlah terbesar di dunia dengan kisaran 87% dari jumlah keseluruhan warganya.

Fakta di atas tidak lantas menjadikan tokoh-tokoh muslim pejuang kemerdekaan dan para ulama Indonesia berkeinginan membentuk Indonesia sebagai negara Islam. Para ulama sekelas KH Hasyim Asyari, KH Ahmad Dahlan, dan ulama-ulama lainnya tidak berambisi mengubah Indonesia menjadi negara dengan sistem *khilafah islamiyah*.

Pertanyaannya, apakah para ulama sekaliber pendiri organisasi-organisasi Islam terbesar itu tidak paham persoalan negara Islam? Ataukah mereka tidak lebih mumpuni dalam keilmuan agama dibandingkan para penyeru *khilafah* yang sampai saat ini masih gagal dalam memperjuangkan sistem *khilafah* itu? Tentu saja jawabannya tidak. Mereka sudah terbukti keilmuannya. Silsilah keilmuannya tak dapat diragukan oleh siapapun.

Para ulama kita mengerti dan paham betul soal Islam dan syariat Islam. Bagi mereka, Islam dan syariat Islam lebih menekankan kepada perilaku, akhlak dan moral, sebelum

seseorang bicara soal simbol-simbol agama. Indonesia dengan ideologi Pancasilanya memiliki visi dan misi menjadi negara yang mengedepankan persatuan, kemanusiaan, kebersamaan, dan kepedulian sosial. Nilai-nilai tersebut semuanya merupakan nilai-nilai syariat Islam yang dikonfirmasi oleh teks suci agama.

Tauladan mengedepankan akhlak dan moral dalam berbangsa sudah dicontoh dengan sempurna oleh Baginda Rasulullah Muhammad SAW ketika di Madinah. Sebagai pemimpin yang membawai ragam kelompok, golongan dan pemeluk agama, beliau SAW mengutamakan persatuan antarumat Islam dan umat agama lain. Beliau menata nilai-nilai kemanusiaan dengan tidak menganakemaskan satu kelompok dan merendahkan kelompok lain.

Pada dasarnya, umat Islam di Indonesia meskipun negaranya bukan berbentuk negara Islam, namun mereka selalu dianakemaskan. Umat Islam bebas melaksanakan ibadah di manapun, baik di masjid, mall, pasar, kereta, bahkan di jalanan sekalipun. Mereka beribadah di mana saja tidak ada yang melarang. Mereka bebas mendirikan yayasan dan lembaga Islam dengan model apapun. Fenomena ini tidak lain sebagai upaya menguatkan Islam dan syariat Islam di Indonesia.

Betapa semestinya umat Islam bersyukur menjadi bangsa Indonesia. Yang, meskipun secara simbolik Indonesia tidak berlabel negara Islam, tetapi umat Islam selalu diutamakan. Umat Islam memiliki Kementerian Agama yang mengatur persoalan nikah, haji, bimbingan Islam, wakaf, zakat, dan lain sebagainya. Umat Islam juga dibebaskan mengembangkan ekonomi syariah jika dirasa ekonomi konvensional ada unsur riba.

Mengutip pendapat Ibn Asyur, syariat Islam pada dasarnya memiliki prinsip memberikan kemaslahatan bagi

seluruh umat, baik individu, kelompok maupun untuk masyarakat urban. Tidak masalah seperti apa label simbol suatu negara, asalkan semua kemaslahatan syariat dapat terpenuhi. Dalam konteks inilah undang-undang, sistem dan ideologi bangsa Indonesia yang diklaim tidak islami perlu ditelaah kembali lebih cermat oleh siapapun yang mengkaimnya. Karena dalam konsep kemaslahatan syariat Islam, hukum undang-undang, sistem dan ideologi bangsa Indonesia sesungguhnya bernilai maslahat. Diadakannya guna memberikan perlindungan agama, jiwa, harta, keturunan dan harga diri manusia [].

Negara Indonesia Ekuivalen Negara Islam

Indonesia merupakan negara yang dihuni oleh mayoritas muslim. Meski demikian, masyarakat yang non-muslim tetap mendapat tempat yang baik di negara tersebut. Mereka mendapatkan hak dan kewajiban sebagaimana warga negara muslim. Indonesia juga merupakan negara yang lahir didasari semangat kebersamaan untuk bebas dari penjajah dengan terbentuknya negara yang merdeka, adil, berdaulat, dengan pengakuan tegas adanya Tuhan Yang Maha Esa.

Sebagai jalan tengah bagi masyarakatnya yang beragam, Indonesia menjadikan Pancasila sebagai ideologinya. Pancasila sebagai landasan kehidupan masyarakatnya baik yang mayoritas ataupun yang minoritas. Pancasila menjadi payung bersama setiap individu warganya untuk mencapai cita-cita luhur kemajuan negara baik kemajuan dalam peradaban ataupun politiknya.

Mahfud MD menegaskan, dengan menjadikan Pancasila sebagai landasan hidup masyarakatnya, Indonesia merupakan negara yang menjadikan prinsip ketuhanan Yang Maha Esa sebagai *causa prima*. Dari sini dipahami bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah negara yang sarat dengan nilai-nilai islami. Negara menjunjung tinggi kedudukan agama-agama. Termasuk eksistensi agama Islam dan syariat-syariatnya secara baik.

Fakta di atas menolak persepsi yang menyatakan bahwa negara Pancasila merupakan negara sekuler, yang menjadikan agama sebagai sesuatu yang tidak boleh menyatu dengan masalah kenegaraan. Ini juga menolak persepsi yang meyakini bahwa

Indonesia merupakan negara dimana hubungannya dengan agama ialah terpisahkan satu dengan yang lain.

Asumsi bahwa negara Indonesia adalah negara sekuler juga tertolak secara otomatis oleh butir-butir pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD), sebagai sumber hukum negara, yang menyatakan bahwa negara terbentuk atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa. Negara Indonesia dibentuk tidak hanya untuk tujuan menjadi negara yang berdaulat, tetapi juga menjadi negara yang mampu mempresentasikan nilai-nilai agama sebagai perintah Tuhan Yang Maha Kuasa.

Kenyataan bahwa negara Indonesia adalah negara yang islami juga nampak dari struktur lima ideologi Pancasila yang bukan saja mencita-citakan masa depan politik bangsa, tetapi juga bagaimana manusia Indonesia menjadi manusia yang taat kepada Tuhan Yang Maha Esa (sila pertama), menjadi manusia yang adil dan beradab (sila kedua), manusia yang Mengedepankan persatuan (sila ketiga), mendahulukan musyawarah di setiap persoalan (sila keempat) dan menjadi insan yang berlaku adil bagi seluruh bangsa (sila kelima).

Fakta-fakta di atas memberi gambaran yang terang bahwa Indonesia sebagai negara yang islami. Suatu negara yang mementingkan nilai-nilai agama sebagai landasan kehidupan warganya untuk mencapai kehidupan yang berkualitas. Ini sejalan dengan pandangan KH Hasyim Muzadi yang menyatakan bahwa negara Islam bukanlah negara yang menerapkan simbol-simbol agama secara *harfiyah*, akan tetapi negara yang mampu memberikan kemaslahatan kepada seluruh lapisan masyarakatnya.[]

Hukum Allah dalam Konteks Berbangsa dan Bernegara

Sebagian umat Islam masih mempersoalkan identitas Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan Pancasila menjadi hukum positif negara. Keduanya diklaim sebagai produk hukum kafir yang tidak perlu ditaati oleh orang Islam. Para penegak kedua hukum tersebut pun diklaim harus diperangi dan dituntut untuk menggantinya dengan hukum Islam dalam naungan *khilafah islamiyyah*. Mereka mengklaim baik Undang-Undang dasar (UUD) 1945 dan Pancasila keduanya bukan hukum Allah, sebagaimana hukum Islam menurut persepsinya.

Narasi hukum Allah yang digaungkan sebagian muslim itu seringkali dengan mendasari pada ayat-ayat Al-Qur'an, satu diantaranya potongan QS. Al-An'am [6]: 57 yang berbunyi, "*inil hukumu illa lillah*; tiadalah hukum kecuali hukum Allah". Ayat ini digunakan mereka untuk membentuk narasi-narasi kekerasan memusuhi hukum UUD 1945 dan Pancasila. Narasi atas bacaan terjemahan atas ayat tersebut hanya melahirkan muslim pemberontak, yang hanya merugikan agama. Negara dianggap taghut, muslim yang tidak mengikutinya wajib diperangi, dan sistem negara wajib diganti dengan sistem Islam. Jika narasi ini terus dibiarkan, bukan tidak mungkin jika akan lahir suasana *Arab Spring* di Indonesia.

Cikal bakal lahirnya muslim berwatak pemberontak ini sudah ada sejak perang Siffin, yaitu peperangan antara kubu Ali dan Muawiyyah. Di akhir peperangan keduanya melakukan *tahkim* (*arbitrase*), perundingan damai antar dua kelompok untuk memutus sengketa peperangan. Akan tetapi Khawarij yang merupakan sekelompok sempalan dari kelompok Ali menolak perundingan damai tersebut. Penolakan Khawarij dengan berdalih

menggunakan ayat (terjemah) Al-Qur'an QS. Ma'idah [5]: 44, 45 dan 47, dengan tuduhan baik Sayyidina Ali atau Muawiyah keduanya telah melanggar hukum Allah, sebab keduanya membuat perjanjian damai. Keduanya dianggap kafir, musyrik dan munafik. Pasca *tahkim* terjadi, kaum *Khawarij*-pun merampas harta Muawiyah dengan klaim sebagai harta rampasan atau *ghanimah*. Kelompok ini juga berusaha membunuh Muawiyah dan Ali atas dasar telah melanggar hukum Allah.

Esensi *tahkim* sebetulnya adalah perjanjian yang akan menghasilkan hubungan damai antar dua kelompok yang berselisih. Terlepas dalam konteks sejarah di atas Muawiyah hanya ingin mengelabuhi kelompok Ali atau tidak. Dalam konteks berbangsa dan bernegara, suatu hukum (perjanjian) yang dapat menengah-nengahi antara berbagai kelompok agama, ras, suku, dan lainnya, yaitu UUD 1945 dan Pancasila. Esensinya keduanya merupakan perjanjain *tahkim*, yang dilahirkan atas dasar kesepakatan para *founding fathers* bangsa untuk mewujudkan NKRI yang dapat menanungi perbedaan dan keragaman di dalam negara. *Tahkim* dalam makna esensial adalah suatu hukum yang dapat memberikan kemaslahatan bagi semua kelompok.

Para ulama telah memutuskan esensi dari hukum Allah atau syariat Allah, bahwa hukum Allah tidak memiliki tujuan kecuali agar terjaganya agama, jiwa, harta, keturunan dan harga diri. Istilah ini dinamakan *maqashid al-syariah*; tujuan-tujuan syariat. Terjaganya agama dalam konteks berbangsa dan bernegara adalah terjaminnya pemeluk agama-agama resmi dalam suatu negara untuk melakukan ibadah dan keyakinan masing-masing. Terjaganya jiwa berarti memastikan tidak ada warga yang diintimidasi, diusir, apalagi dibunuh karena

keyakinan yang berbeda. Terjaganya harta dalam konteks berbangsa dan bernegara yaitu terjaminnya kesejahteraan setiap individu di bawah hukum negara. Pun demikian, terjaganya keturunan serta harga diri adalah jaminan yang didapat oleh setiap individu dalam suatu negara untuk bebas berekspresi, berpendapat, dan mendapatkan layanan hidup, dalam koridor hukum yang berlaku.

Muhammad Machasin menyebut ada banyak ayat Al-Qur'an yang secara literal mengulas tentang hukum-hukum Allah. Hukum-hukum Allah dalam teks suci agama itu bisa bermakna tiga hal; *pertama*, hukum Allah yang berarti hukum alam (*sunatullah*); *kedua*, hukum Allah yang berarti hukum yang ada dalam hubungan antara manusia dengan manusia yang lain; dan *ketiga*, hukum Allah yang berarti ketentuan Allah agar manusia selalu berada dalam rel keimanan. Mengenai penjelasan (tafsir) rinci atas tiga hukum ini para ulama berbeda-beda pendapat. Akan tetapi menurutnya, perbedaan pemaknaan itu esensinya memberi makna bahwa boleh jadi hukum Allah yang dimaksudkan dalam agama adalah hukum-hukum yang lahir dari persepsi dan interpretasi manusia yang didasari pada firman Allah.

Dari penjelasan di atas dapat diambil benang merah bahwa hukum Allah dalam konteks berbangsa dan bernegara adalah hukum yang dapat menjadi penyatu dan pemersatu antar perbedaan dan keragaman dalam negara, dalam konteks Indonesia adalah UUD 1945 dan ideologi Pancasila. Keduanya merupakan hukum yang dapat memberikan ruang bagi seluruh elemen bangsa mendapatkan hak dan kewajiban sebagai rakyat. Hukum Allah dalam konteks berbangsa dan bernegara adalah hukum yang dapat memberikan kemaslahatan bagi banyak orang

dan dapat berupa hukum hasil interpretasi manusia atas ayat-ayat Al-Qur'an. Tidak dibenarkan jika dikatakan agama Islam mengklaim hukum Allah hanya berlandaskan makna terjemah Al-Qur'an yang lepas dari esensi kandungan makna ayat-ayat Al-Qur'an yang dimaksud.[]

Negara Islam Juga Terjangkit Covid-19

Dunia hingga hari ini masih menghadapi wabah Covid-19. Setiap negara yang terdampak virus mematikan itu membuat kebijakan yang beragam guna memutus mata rantai penularan yang lebih banyak lagi, dari mulai *lockdown* total, *lockdown* sebagian daerah, hingga menggunakan kebijakan ekstrim guna mengurangi penyebaran penyakit tersebut.

Di balik musibah yang juga menjadi keprihatinan negara Indonesia ini muncul sebagian kelompok yang mengaku memeluk agama Islam menawarkan solusi pemberantasan Covid-19 dengan merubah model negara menjadi negara Islam. Negara-negara di dunia, termasuk Indonesia diklaim akan segera bebas dari musibah pandemi hanya jika menerapkan sistem Islam sebagai konstitusi negara. Sebaliknya, sistem-sistem buatan manusia seperti Demokrasi dan ideologi Pancasila harus diganti dengan sistem Islam agar wabah virus itu segera berakhir.

Munculnya solusi yang terkesan sejalan dengan agama namun cacat logika ini lahir dari sekelompok muslim yang mencita-citakan sistem *khilafah islamiyah*. Dalam konteks Indonesia, rasa dendam (para pengasong *khilafah*) karena konsep *khilafah* dibubarkan pemerintah melalui Perppu Ormas No 2 Tahun 2017 membuat konsepsi negara Islam *khilafah* kembali digaungkan di tengah umat sedang genting dalam wabah Covid-19.

Memberikan solusi penyakit fisik dengan konsep negara Islam betapapun tidak nyambung. Covid-19 tidak pernah memandang status maupun sistem negara yang dihuni seseorang. Covid-19 dapat menjalar kepada negara manapun, baik negara Islam, negara kapital, negara Demokrasi, ataupun model negara

lainnya. Covid-19 bisa mewabah di mana saja dan kapan saja sesuai dengan aktivitas masyarakat dan kepatuhan mereka di dalamnya.

Faktanya, banyak negara-negara Islam di dunia yang juga terdampak virus Corona. Iran misalnya, negara para *mullah*, rakyatnya terjangkit virus tersebut. Begitu juga dengan Afghanistan, Turki, Mesir, Maroko dan lainnya. Semuanya merupakan negara Islam atau minimal negara dengan mayoritas penduduk muslim yang semuanya terjangkit virus yang mulanya muncul dari China itu.

Benar bahwa Covid-19 merupakan makhluk Allah SWT. Namun tidak elok memberikan solusi penyakit yang mewabah dengan cara mengubah sistem negara. Nabi Muhammad saja ketika sakit beliau tidak hanya berdoa, namun yang utama adalah ikhtiar medis. Beliau memakan minyak Zaitun dan mengoleskannya ke bagian tubuh guna menyembuhkan penyakitnya. Beliau menggunakan kayu Siwak supaya gigi beliau terhindar dari penyakit gigi dan gusi. Dengan kata lain, penyakit fisik dapat disembuhkan dengan ikhtiar medis (dan tentu dengan doa), bukan dengan solusi yang sama sekali tidak relevan, yaitu merubah sistem negara.

Covid-19 tidak dapat dihentikan dengan cara merubah sistem negara menjadi negara Islam. Pandemi virus ini hanya bisa diselesaikn dengan cara mengikuti panduan tenaga medis dan kebijakan pemerintah dalam menangani virus mematikan tersebut. Mencuci tangan secara rutin, menjaga jarak satu dengan yang lain, tidak berkerumun, dan dibarengi dengan doa kepada Allah merupakan langkah-langkah konkrit untuk bebas dari virus langka itu. Status negara Islam tidak menjamin bisa

menyembuhkan bangsa dari Covid-19. Karena negara-negara Islam di dunia pun terjangkit wabah tersebut.[]

Daftar Pustaka

Abdullah, Amin, *Dinamika Islam Kultural: Pemetaan Atas Wacana Keislaman Kontemporer,* Yogyakarta: IRCiSOD, 2020.

Ahmad, Yasin, "Yamin dan Tafsir Tunggal Atas Sejarah Indonesia" dalam Geotimes, 2018?

Al-Alusi, Imam, *Ruh Al-Ma'ani*, Mesir: Dar Ihya Litturats Al-'Arabi, 1412 H.

Ansari, M.T., *Islam and Nationalism in India*, Berlin: Routladge, 2016.

Aspinal, Edward, *Islam and Nation: Separatiest Rebellion in Aceh Indonesia*, Standford: Standford University, 2009.

Al-Baidhawi, Imam, *Anwar al-Tanzil wa-Asrar al-Ta'wil*, Lebanon: Dar Al-Ma'rifah, t.th.

Bawazir, Tohir, *Jalan Tengah Demokrasi: Antara Fundamentalisme dan Sekularisme*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015.

Basri, dkk, "Trandencental Values in Pancasila As The Personality of The Indonesian Nation (Perspective From A Muslim)", in *Journal of Transendental Law*, Jilid. 2, No. 2, 2020.

Bayat, Asef, *Making Islam Democratic,: Social Movements and the Post-Islamist Turn*, Leiden: Leiden University, 2015.

Al-Buruswi, Ismail Haqqi, *Tafsir Ruh Al-Bayan*, Lebanon, Dar Al-Kutub Al-Islami, 2007.

Esposito, John L., *Islam and Democracy*, Oxford: Oxford University, 1996.

Faris, Abdul Qadir Abu, *Fiqih Politik Hassan Al Banna*, Jakarta: Mutiara Ilmu Selekta, 2011.

Al-Farisi, Leli Salman, "Harmonisme Pancasila dan Islam", dalam Jurnal *Aspirasi*, FISIP Unwir Indramayu,Vol. 10, No. 1, 2019.

Gibson, Dawn-Marie and Herbert Berg, *New Perspective on The Nation of Islam*, London: Routladge, 2019.

Halliday, Fred, *Nasionalism and Its Future*, Berlin: Springer, 2003.

Haq, Hamka, *Pancasila 1 Juni dan Syariat Islam*, Jakarta: RM Book, 2011.

Hashemi, Nader, "Islam and Democracy", dalam *The Oxford Handbook of Islam and Politics*, 16 Desember 2013.

Hook, Sidney, *Pragmatism, Democracy, and Freedom: The Essential Essays*, USA: Prometheus, 2002.

Imarah, Muhammad, *Islam dan Pluralisme*, Jakarta: Gema Insani, 1999.

Islam, Nadzrul dan Md Saidul Islam, *Islam and Democracy in South Asia*, Micigan: Palgrave Macmillan Chan, 2020.

Al-Ka'bi, Hatim Abdul Sahib, *The Nation of Islam*, Chicago: University Chicago, 1951.

Kahin, Audrey R., *Islam, Nasionalism and Democracy: a Political Biography of Muhammad Natsir*, Singapore: National University of Singapore, 2012.

Katsikas, Stefanos, *Islam and Nasionalism in Modern Greece 1821-1940*, Oxford: Oxford University, 2021.

Latif, Yudi, *Wawasan Pancasila*, Bandung: Mizan, 2021.

Lufaefi, *Bela Islam Indonesia Bela Kemanusiaan*, Klaten: Mitra Karya, 2019.

_____, *Buanglah Khilafah Pada Tempatnya*, Jakarta: Yayasan Nuansa Panji Insani, 2021.

_____, *Nasionalisme Qur'ani: Pesan Al-Quran untuk Mencintai Tanah Air dan Bangsa*, Jakarta: Yayasan Nuansa Panji Insani, 2020.

Machasin, Muhammad, *Agama, Kemanusiaan, dan Keadaban: 65 Tahun Prof. Dr. KH. Muhammad Machasin*, Yogyakarta: Suka Press, 2021.

Manik, Toba Sastrawan, dkk, "Islam and Pancasila: Perspective of Indonesiaon Posgraduate Muslim Studies", dalam Jurnal *SOSPOL*, Vol. 7, No. 1, 2017.

Manzur, Ibn, *Lisan Al-Arab*, Beirut: Dar Al-Kitab Al-'Imiyyah, 2008.

Marx, Karl, Ekonomi Politik dan Aksi Revolusi, Jakarta: Diadit, 2006.

Matson, Ingrid (ed.), *Religion and Represesentation Islam and Democracy*, US: Cambridge University, 2015.

Mernissi, Fatema, *Islam and Democracy*: Fear of Modern World, T.Pn: Basic Book, 2002.

MD, Mahfud, *Pancasila Sering Diuji dan Ditentang Tapi Selalu Menang*, Detik.com.

Muhammad, Silis, *The Wake of the Nation of Islam*, 2019.

Mumazziq, Rizal dan Ahmad Khubby, "Becoming an Indonesian Muslim: The Idea of Religious Nationalism by KH. A. Wahid Hasyim 1945-1953", dalam jurnal *Dinika*, Volume 6, Number 1, January - June 2021.

Naqavi, Ali Muhammad, *Islam and Nationalism*, UK: Alhoad, 1998.

An-Nawawi, Imam, *Tafsir Marah Labid*, Lebanon: Dar Al-Kutub, 2008.

Qodi, Mahdi Ali, *Go Ahead and Dont Change! (A Reproach to the Nation of Islam)*, Pakistan: University of Pakistan, 2012.

Qodir, Zuly, *Paradigma Baru Wacana dan Aksi Islam Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.

Reich, Walter, *Origins of Terrorism: Psychologies, Ideologies, Theologies, States of Mind*, Jakarta: Rajagrafindo, 2019.

Renan, Ernest, *What is Nation*, Columbia: Columbia University Press, 1882.

Sehmi, Anwarul Haq, *Nationalism, Islam and Pakistan*, tp: Islmic Publication, 1980.

Shihab, M. Quish, *Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Ciputat: Lentera Hati, 2003.

Siraj, Said Aqil, *Islam Kebangsaan; Fikih Demokratis Kaum Santri*, Jakarta: Pustaka Ciganjur, 2003.

_____, *Islam Sumber Inspirasi Budaya Nusantara*, Jakarta: LTN PBNU, 2018.

Soekarno, *Nasionalisme, Islamisme, Marxisme*, Yogyakarta: IRCiSOD, 2021.

Sohaili, Amir dan Zawar Khan, "Nationalism in the Poetry of Dr. Allama Iqbal, Muhammad and Walt Whitman: A Comparative Literary Analysis of I Hear America Singing and Tarana-I-Hindi", *Journal English Language Teaching*, Vol. 6, No. 1, 2021.

As-Syaukani, Imam, *Tafsir Fath Al-Qadiir*, Beirut: Dar Al-Kitab Al-'Imiyyah, 2008.

As-Syaukani, Luthfi, *Ideologi Islam dan Utopia; Tiga Model Negara Demokrasi di Indonesia*, Jakarta: Freedom Institut, 2011.

At-Tamimi, Muhammad, *Kitab Tauhid Pemurnian Ibadah Kepada Allah*, Jakarta: Yayasan Al-Shofwa, 2017.

Taqwi, Muhammad, *Al-Islam wa Al-Qaumiyyah*, t.pn: Manzumah al-'Islami Qism al-Lughah ad-Dauliyyah, 2019.

Wahid, Abdurrahman dan Syafi'i Anwar, *Islamku, Islam Anda, Islam Kita*, Jakarta: The Wahid Institut, 2006.

Wahyono, Padmo, *Penjabaran Pancasila dalam Peraturan Perundang-undangan*, Jakarta: RM Book, 2012.

Biografi Penulis

Lufaefi, S.Ag., M.Ag., lahir di Brebes pada 15 September dan sekarang menetap di Bogor, Jawa Barat. Pendidikan S1 dan S2 ditempuh pada Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (IAT) di Universitas Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an (PTIQ) Jakarta. Pada kedua jenjang pendidikan tinggi tersebut ia meraih predikat sebagai Mahasiswa terbaik dan tercepat. Pendidikan non-formalnya ia tempu di Ponpes KHAS Kempek Cirebon selama tujuh tahun dan di Pare Kediri *takhasus* Bahasa Inggris.

Saat menempu pendidikan tingkat sarjana ia sering "dimarahi" oleh Dosen Bahasa Indonesianya karena tulisannya yang tidak sejalan dengan kaidah-kaidah penulisan yang baku (*amburadul*). Di depan semua mahasiswa seangkatannya, saat itu, kesalahan-kesalahan tulisannya sering diperlihatkan. Tak jarang teman-temannya menertawakan tanpa henti. Tekanan dan teguran juga didapatkannya dari Dosen literasi pertamanya itu.

Tapi, karena keikhlasan Dosennya mengampu, tekanannya justru berubah menjadi berkah. Kesulitan-kesulitan menulis berubah menjadi kemudahan. Mahasiswanya, termasuk penulis buku ini, banyak yang terjun di dunia literasi, seperti jurnalis, editor, pengelola jurnal, bahkan pengusaha penerbitan buku. Hanya doa-doa terbaik kami panjatkan untuk Almarhum Bapak Hernowo. Beliau guru literasi terbaik sepanjang masa yang akan selalu dikenang anak-anak didiknya. *Alfatihah* untuk beliau.

Buku *Mencintai Islam Mencintai Indonesia* adalah karya keempatnya. Sebelumnya ia menulis buku dengan judul *Buanglah Khilafah Pada Tempatnya!* (YNPI, 2021), *Nasionalisme Qur'ani* (Nuansa Publishing, 2020) dan *Bela Islam Indonesia Bela Kemanusiaan* (Mitra Karya, 2019). Ia aktif dalam

kegiatan riset keagamaan di Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan Kementerian Agama RI. Beberapa hasil penelitiannya adalah: *Tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah dalam Dinamika Kerukunan Umat Beragama di Kota Pekalongan* (2019) dan *Pengajaran Moderasi Beragama dalam Tarekat: Studi Terhadap Mahasiswa Ahlith Thoriqoh Al-Mu'tabarah An Nahdliyyah, Bandung, Jawa Barat* (2020).

Ia juga telah menulis lebih dari 40 artikel jurnal ilmiah sejak 2017-2023 di berbagai lembaga dan jurnal universitas di Indonesia. Beberapa di antaranya adalah: *Celebrating Sharia Indonesia: Islamic Harmony And Pancasila in The Vision Of Nationality Indonesia* (Jurnal Syir'ah Iain Manado 2019), *Kritik Atas Penafsiran Ayat-ayat Khilafah: Studi Tafsir Al-Wa'ie Karya Rokhmat S. Labib* (Jurnal Al-Fanar IIQ Jakarta 2018), *Harmonisme the Jurisprudence of Jafari and Hanafi: Historical Study and Both Legal Sources* (Jurnal Afkar UIN Bandung 2018), *Negara Pancasila: Inspirasi Model Negara Islam Kontemporer Berbasis Tafsir Maqaṣidi* (Jurnal Citra Ilmu STAINU Temanggung 2019), dan lain sebagainya (dapat dilihat pada akun Google Scholar "Lufaefi").

Selain aktif menulis, ia aktif menjadi pembicara dalam berbagai seminar dan konferensi baik nasional maupun internasional, seperti diantaranya pada Muktamar Pemikiran Santri Nasional Kemenag RI (2019), International Symposium of Religious Life (ISRL) Kemenag RI (2019), International Symposium Postgraduate UIN Walisongo Semarang (2019), Mu'tamad Khazanah Pemikiran Santri dan Pesantren (2021), AICIS Kemenag (2021), ICROM Kemenag (2022) dan lain-lainnya.

Aktivitas saat ini sebagai Dosen tetap di STAI Nurul Iman Parung Bogor dan Dosen di STAI Sadra Jakarta. Penulis juga aktif sebagai jurnalis pada media mainstream AKURAT.CO, menahkodai kanal keislaman. Selain itu, penulis bersama istri tercinta Lukita Fahriana juga mendirikan penerbitan buku dengan nama **Penerbit Abdi Fama**, yang telah menerbitkan ratusan judul. Penulis bisa dihubungi melalui email: eepivanosky@gmail.com, instagram: lufaefi, dan WhatsApp: 08977854425.

Penerbit
Abdi Fama
Semesta Literasi untuk Negeri

MENCINTAI ISLAM MENCINTAI INDONESIA

Kecintaan dan kesetiaan kepada agama Islam bukan sesuatu yang bertolak belakang dengan semangat berbangsa dan bernegara. Seseorang yang beragam Islam dengan baik, ia juga akan berkepribadian kebangsaan Indonesia dengan baik.

Indonesia adalah "potongan surga" yang Allah turunkan menjadi nikmat keteladanan berbangsa bagi dunia. Indonesia dibangun di atas keragaman suku, bahasa, budaya, dan agama. Nilai-nilai syariat Islam melekat erat dalam ideologi Pancasila, sistem Demokrasi, semangat kebangsaan, dan dalam konstitusi negara.

Buku ini terdiri dari empat pembahasan; Pancasila dan Islam, Demokrasi dan Islam, Nasionalisme dan Islam, serta Syariat Islam dan Undang-undang Dasar. Buku ini menjadi kompas beragama sekaligus bernegara dengan cara yang elegan. Selamat membaca!

Penerbit Abdi Fama
Jl. Pemawaman, No. 80,
Ciampea, Ciampea, Bogor,
Jawa Barat.

Penerbit Abdi Fama
penerbit_abdifama
www.abdifamagroup.com
abdifama.group@gmail.com

ISBN 978-623-09-0867-2
9 786230 909672